

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI KEMISKINAN
UNTUK MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS)
DI GAMPONG LAMPULO KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA
ACEH**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Muhammad Khalil

NIM. 180801062

**PRODI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY**

2023

PERNYATAANN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Khalil
Nim : 180801062
Program studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Babah Krueng, 07 November 2000

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

- 1 Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
- 2 Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- 3 Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4 Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
- 5 Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Desember 2023




Muhammad Khalil

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI KEMISKINAN
UNTUK MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS)
DI GAMPONG LAMPULO KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA
ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penelitian Skripsi Pada
Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

MUHAMMAD KHALIL

NIM : 180801062

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Rizkika Lhena Darwin M.A
NIP. 198812072018032001

Pembimbing II



Renaldi Safriansyah, SE., M.HSc.
NIDN. 2007017903

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI KEMISKINAN UNTUK
MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS) DI GAMPONG
LAMPULO KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Peserta Ujian Munaqasyarah Skripsi
Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Diajukan Oleh :

Muhammad Khalil

Nim. 180801062

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Desember 2023
5 Jumadil Akhir 1445 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Rizkika Lhena Darwin M.A.
NIP. 198812072018032001

Sekretaris,



Renaldi Safriansyah, SE., M.HSc.
NIP. 197901072023211003

Penguji I



Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003

Penguji II



Melly Masni, M.IR.
NIP. 199305242020122016

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



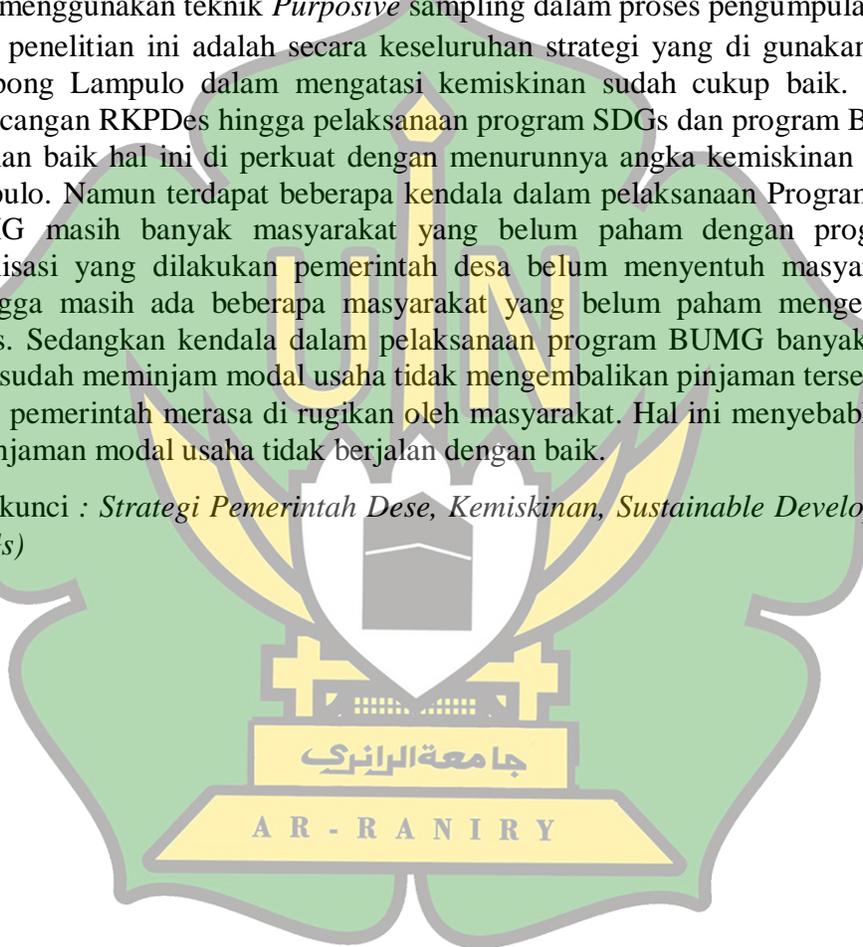
Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 1974033271999031005

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan yang lebih dari satu, dari permasalahan kemiskinan mampu menimbulkan persoalan-persoalan sosial yang baru. Oleh karena itu kajian kemiskinan sering disebut sebagai “kajian abadi” yang selalu di cari solusinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat strategi pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan teknik *Purposive* sampling dalam proses pengumpulan data.

Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan strategi yang di gunakan pemerintah Gampong Lampulo dalam mengatasi kemiskinan sudah cukup baik. dimulai dari perancangan RKPDes hingga pelaksanaan program SDGs dan program BUMG sudah berjalan baik hal ini di perkuat dengan menurunnya angka kemiskinan di Gampong Lampulo. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Program SDGs Dan BUMG masih banyak masyarakat yang belum paham dengan program SDGs, sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa belum menyentuh masyarakat awam, sehingga masih ada beberapa masyarakat yang belum paham mengenai program SDGs. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan program BUMG banyak masyarakat yang sudah meminjam modal usaha tidak mengembalikan pinjaman tersebut sehingga pihak pemerintah merasa di rugikan oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan program peminjaman modal usaha tidak berjalan dengan baik.

Kata kunci : *Strategi Pemerintah Dese, Kemiskinan, Sustainable Development Goals (SDGs)*



KATA PENGANTAR

puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “strategi pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan untuk mewujudkan *sustainable development goals* (SDGs) di gampong lampulo kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Shalawat beriring salam kepada junjungan Allah dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Penulis skripsi ini dapat selesai tentunya tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan masukan dari banyak pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Rizkika Lhena Darwin M.A selaku pembimbing I dan Bapak Renaldi Safriansyah, SE., M.HSc selaku dosen pembimbing II. Berkat bimbingan dari bapak yang telah memberikan masukan, saran dan kritikan yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua, ibunda tercinta Murniati dan ayahanda tercinta M. Idris. Terimakasih atas doa yang tak henti-hentinya terus mengalir untuk keberhasilan dan kelancaran penulis. Kau sosok ayah dan ibu yang hebat untukku yang selalu membimbing dan memberi dukungan moral selama ini. Penulis sungguh merasa bersyukur memiliki kedua orang tua yang hebat sebagai ayah dan ibu yang selalu mendoakan keberhasilan penulis, dan memberikan motivasi disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas.

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, Mag. Selaku rektor UIN Ar-raniry.
2. Dr. Muji Mulia M. Ag, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry beserta jajarannya.

3. Rizkika Lhena Darwin, M.A, selaku ketua prodi ilmu politik. Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A., selaku sekretaris prodi ilmu politik, dan Rizkika Lhena Darwin, M.A, selaku penasehat akademik (PA).
4. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2018, yang telah memberikan masukan beserta motivasi yang tidak henti-hentinya dari kalian yang menambah daya pacu semangat peneliti untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Kepada informan yang sudah memberikan banyak informasi dan pengetahuan kepada peneliti selama proses penelitian berlangsung
6. Segenap pihak yang hadir, membantu dan memberikan masukan serta kritik konstruktif kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung pada saat penggarapan dalam penulisan skripsi ini sampai dengan selesai. Atas semua kebaikan semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
7. Dan terimakasih pada diri sendiri yang telah berhasil dan mampu mencapai pada titik ini. So Proud Of My Self. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. Knowing what things to keep and what things to release. You can't carry all things.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan Balasan akhir kata penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembanca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, Oktober 2023

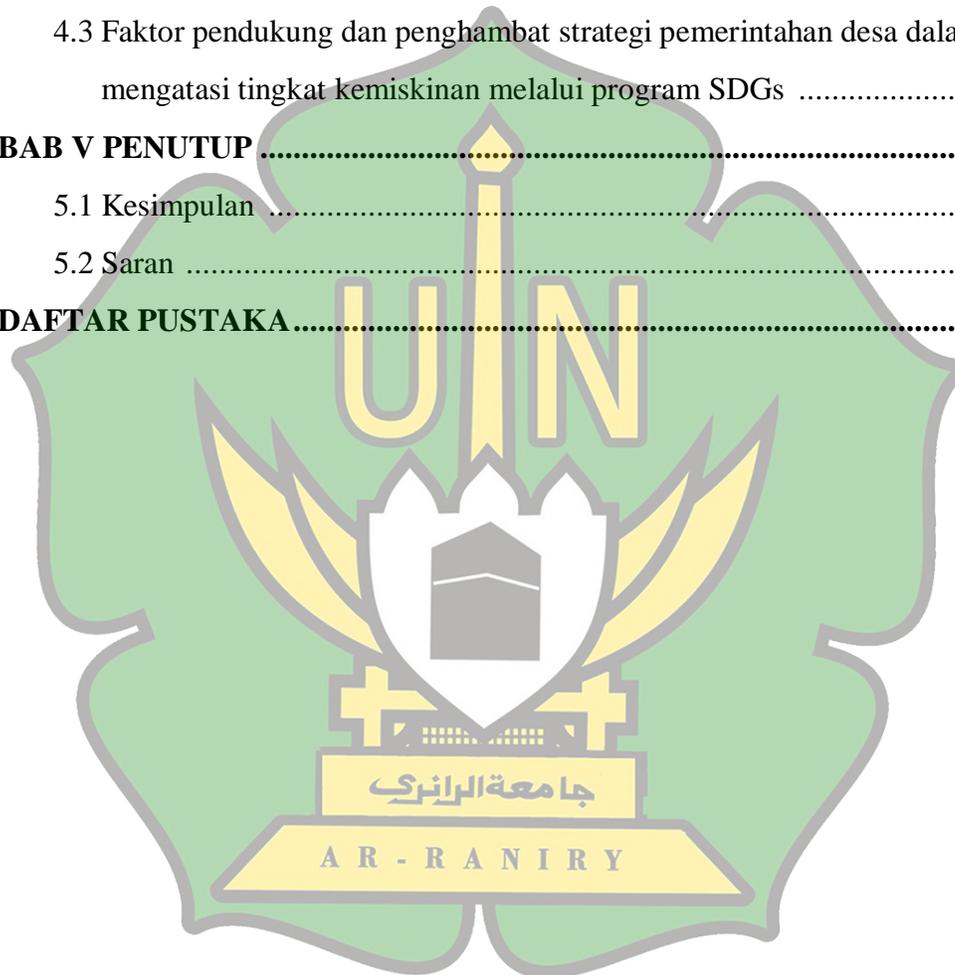
Penulis

Muhammad khalil

DAFTAR ISI

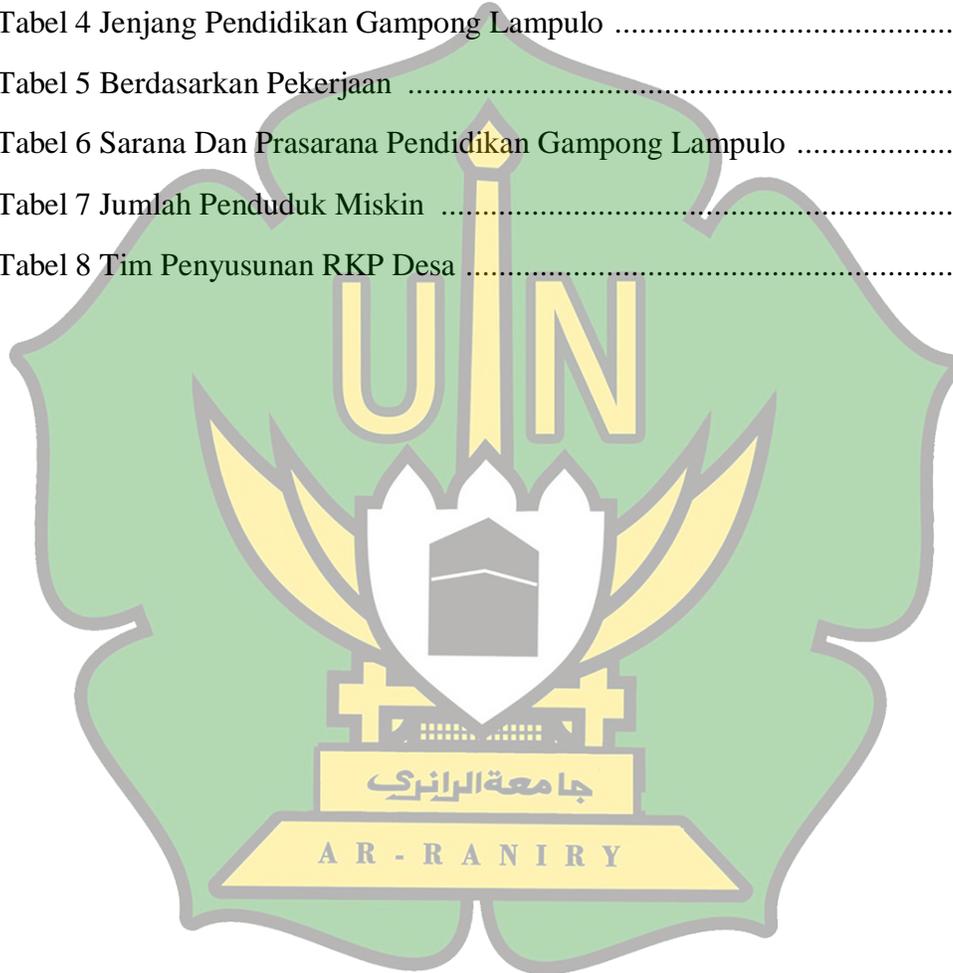
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori.....	10
2.2.1 Teori Dan Konsep	11
2.2.1.1 Definisi Strategi	11
2.2.1.2 Manajemen Strategi	12
2.2.1.3 Aspek-Aspek Strategi	16
2.2.2 Kemiskinan	17
2.2.2.1 Bentuk dan Jenis Kemiskinan	20
2.2.2.2 Indikator Kemiskinan	22
2.2.2.3 Faktor Faktor Kemiskinan	24
2.2.3 Sustainable Development Goals (SDGs) Desa	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Pendekatan Penelitian.....	30
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	31
3.4 Informan Penelitian	32

3.5 Jenis Pengumpulan Data.....	32
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Profil Dan Sejarah Singkat Gampong Lampulo	36
4.2 Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Gampong Lampulo	46
4.3 Faktor pendukung dan penghambat strategi pemerintahan desa dalam mengatasi tingkat kemiskinan melalui program SDGs	66
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73



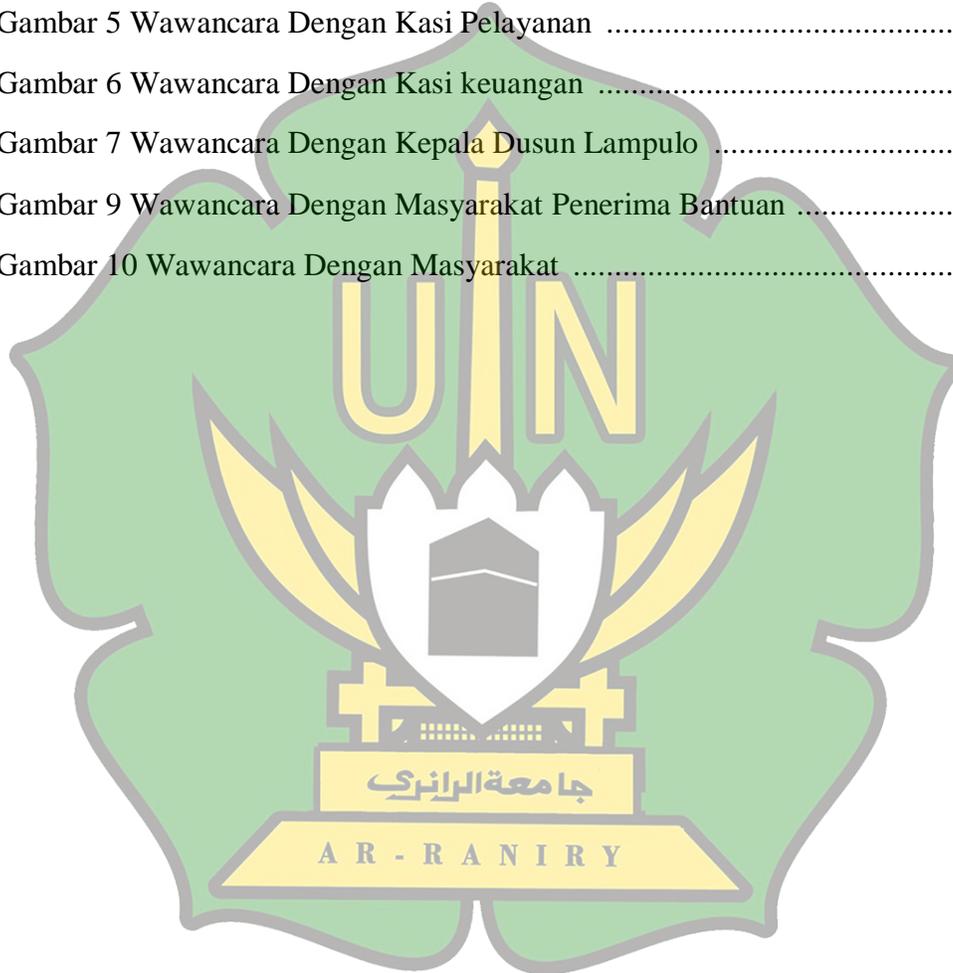
DAFTAR TABEL

Tabel 1 Dana Desa Gampong Lampulo	4
Tabel 2 Informan Penelitian	5
Tabel 2 Jumlah Penduduk Gampong Lampulo	46
Tabel 3 Berdasarkan Kelompok Usia	47
Tabel 4 Jenjang Pendidikan Gampong Lampulo	48
Tabel 5 Berdasarkan Pekerjaan	48
Tabel 6 Sarana Dan Prasarana Pendidikan Gampong Lampulo	50
Tabel 7 Jumlah Penduduk Miskin	50
Tabel 8 Tim Penyusunan RKP Desa	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Gampong	45
Gambar 2 Wawancara Dengan Kepala Desa Lampulo	88
Gambar 3 Wawancara Dengan Kepala urusan Umum dan Perencanaa	88
Gambar 4 Wawancara Dengan Sekeretaris Desa	89
Gambar 5 Wawancara Dengan Kasi Pelayanan	89
Gambar 6 Wawancara Dengan Kasi keuangan	90
Gambar 7 Wawancara Dengan Kepala Dusun Lampulo	90
Gambar 9 Wawancara Dengan Masyarakat Penerima Bantuan	91
Gambar 10 Wawancara Dengan Masyarakat	91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan inisiatif dari 193 negara yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial dan juga bisa bersinergi dengan lingkungan. SDGs memiliki 17 tujuan, yaitu tanpa adanya kemiskinan, tidak ada kelaparan, kualitas Pendidikan yang baik, kesehatan dan kesejahteraan, air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi infrastruktur, industry dan inovasi, akses ke energi yang terjangkau, mengurangi ketimpangan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, kota dan komunitas yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem darat, menjaga ekosistem laut, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat, kemitraan untuk mencapai tujuan. Dari beberapa tujuan SDGs tersebut membantu permasalahan tentang pembangunan secara lebih menyeluruh, *Sustainable development goals* yang bersifat global berperan penting bagi keseimbangan seluruh negara, yaitu bagi negara berkembang dan negara maju, supaya memiliki peran yang maksimal dalam pembangunan negara, setiap negara telah memiliki peran dan tanggung jawab yang sama untuk mencapai SDGs.¹

¹ Panuluh, S., dan Fitri, M. R. (2016). *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indoneisa*.

Dari beberapa data yang ada, Indonesia merupakan negara dengan garis kemiskinan yang masih tinggi mencapai angka 11% dan sudah mengalami penurunan dari angka sekitar 15% di 20-30 tahun lalu dan menjadi 11,7% dengan memiliki rekam jejak yang bagus dalam pelaksanaan MDGs, dengan adanya pendanaan yang baik dan fokus pada SDGs di bidang Pendidikan dan kesehatan, maka Indonesia dapat membangun kerjasama dengan mitra-mitra yang bagus dan memberikan hasil yang baik di wilayah Indonesia pada tahun 2030 mendatang.²

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh SDGs adalah “menghilangkan kemiskinan” karena Kemiskinan merupakan permasalahan yang lebih dari satu, dari permasalahan kemiskinan mampu menimbulkan persoalan-persoalan sosial yang baru. Oleh karena itu, kajian kemiskinan sering disebut sebagai “kajian abadi” yang selalu dicari solusinya.³ Bagi negara Indonesia, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang beban berat bagi pemerintahan, lebih-lebih jika dihubungkan dengan disparitas yang semakin melebar antara si miskin dan si kaya. Sebagai bagian dari PBB, tentunya Indonesia telah berkomitmen dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.⁴

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana terdapat beberapa penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs*) dan masyarakat

² Ahmad, Dodi Kurtubi. 2018. “Sustainable Goals (SDGs) dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial” <https://www.riau.go.id/home/skpd/1970/01/01/3740-sustainabledevelopment-goals-sdgs-dan-pembangunan-kesejahteraan-sosial-oleh-dodi>, di akses tanggal 27 January 2022

³ Islam Faruk Zaini. 2021. *Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa*. Universitas Hasanuddin Makassar.

⁴ Ishartono & Raharjo, T.S. 2015. *Sustainable Development Goals (SDGs) Dan- Pengentasan Kemiskinan*. Social Work Jurnal. 6(2),159 –167.

tersebut berada di bawah kebutuhan minimum. Dan BPS dalam melihat kemiskinan juga berdasarkan pada kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Yaitu nilai kebutuhan dasar minimum tersebut di gambarkan dengan garis kemiskinan.

Untuk meminimalisir tingkat kemiskinan, pada tahun 2020 pemerintah Indonesia mengeluarkan *Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa*, yang tujuan dari program tersebut adalah untuk memprioritas penggunaan dana desa lebih maksimal pada tahun 2021.⁵ Yang fokus pada pencapaian SDGs, sehingga dana desa yang di salurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat desa, hingga golongan terbawah untuk mengurangi angka kemiskinan di desa.

Dalam *Sustainable Development Goals (SDGs) Desa* terdapat delapan pilar sebagai acuan pembangunan desa yang setiap desanya memiliki kebutuhan masing-masing. Adapun delapan tipe desa adalah sebagai berikut:⁶ Desa yang bebas dari kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa yang peduli dengan lingkungan, desa ramah perempuan, desa peduli Kesehatan, desa peduli Pendidikan, desa tanggap budaya, dan desa berjejaring.

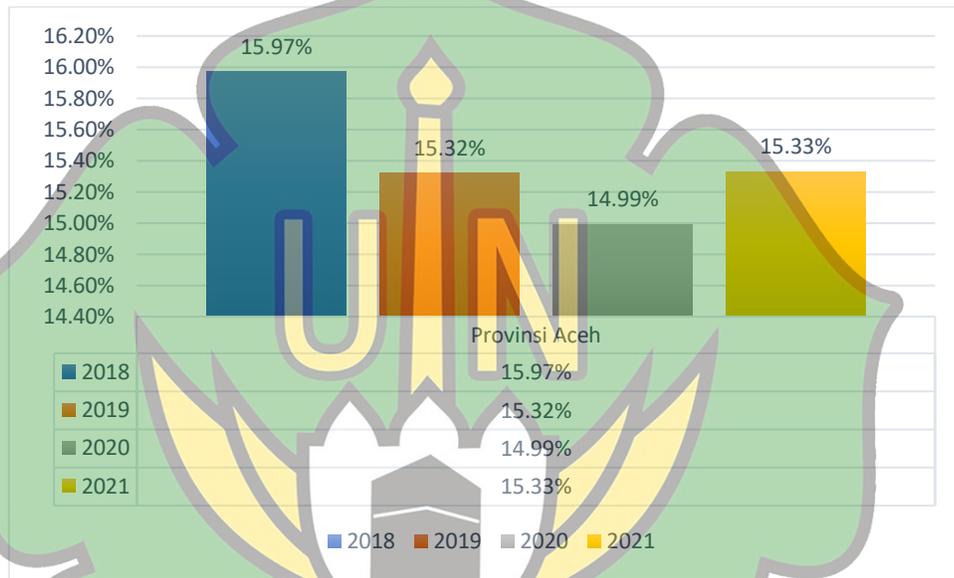
Di Indonesia memiliki beberapa daerah yang tingkat kemiskinan berbeda dari sisi presentase ataupun jumlahnya. Jumlah penduduk, Keadaan demografis, hingga kebijakan daerah yang berbeda-beda dapat menjadi permasalahan yang mendorong

⁵ Islam faruk zaini, Rahmat Muhammad, Andi Haris, dkk. *Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa*, P-ISSN:2685-5348,E-ISSN:2685-4333, hal 128.

⁶ Siswanto, H. (2021). *SDGs Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Pelatihan Penyusunan RJM Desa Kabupaten Bogor.

hal tersebut. Provinsi Aceh salah satu provinsi dengan angka kemiskinan sangat tinggi di pulau sumatera, bahkan menjadi provinsi termiskin di Sumatera, hal ini di sebabkan oleh populasi penduduk yang bertambah, Pendidikan dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Grafik 1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh



(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh)

Dilihat grafik 1.1 bahwa penduduk miskin di provinsi Aceh cukup tinggi, mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 15,32% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi sebesar 14,99% ini cukup baik, tetapi pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu 15,33%. Jika dilihat secara keseluruhan setiap tahunnya mengalami perubahan jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh. Dengan melihat persentase penduduk miskin dan juga tingkat penduduk miskin yang sangat tinggi setiap tahunnya, dapat di nilai

bahwa pengetasan kemiskinan di Provinsi Aceh masih kurang baik dibandingkan wilayah sumatera lainnya.

Sedangkan Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sendiri jika dilihat dari persentase penduduk miskin pada tahun 2018 tercatat sebesar 10,27% namun pada 2021 persentase angka kemiskinannya naik sebesar 12,43%.⁷ Dari data di atas bisa di lihat Gampong Lampulo masih memiliki masalah kemiskinan yang harus di selesaikan oleh pemerintah untuk mencapai program *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sementara itu dana desa yang di alokasikan kesetiap desa oleh pemerintah desa sangatlah cukup untuk mengurangi angka kemiskinan. Pada tahun 2021 Kementrian Desa telah mengalokasikan dana desa sebanyak 72 triliun yang disalurkan ke 74.961 Desa di Indonesia.⁸ Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh merupakan gampong dengan pendapatan dana desa yang setiap tahunnya mengalami perubahan. Adapun anggaran dana desa tahun 2019 sampai 2021 sebagai berikut.

Tabel 1.2 Dana Desa Gampong Lampulo

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021
Dana Desa	Rp 945.299.000	Rp 1.020.644.000	Rp 1.144.619.000

Sumber: Kantor Desa Gampong Lampulo

⁷ Kantor Keuchik Gampong Lampulo, di akses pada tanggal 4 Oktober 2022.

⁸ Kementrian Desa, PDT Dan Transmigrasi. 2022. “Sistem Informasi Desa”.<https://kemendes.go.id/> di akses pada tanggal 11 Oktober 2022

Dana desa yang di atas mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2022 Gampong Lampulo mendapatkan angka yang cukup besar dikarenakan tingginya angka kemiskinan yang terjadi di gampong lampulo. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukkan bagi desa yang di tranfer dari APBD kabupaten dan kota yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.⁹

Permasalahan kemiskinan yang terjadi di lampulo di dasarkan banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai ketidaktetapan pekerjaan seperti nelayan, pedagang, petani, buruh, serta masih banyaknya pengangguran di Gampong Lampulo. Kemiskinan yang terjadi di Lampulo berdasarkan observasi awal peneliti disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang disebabkan rendahnya Pendidikan sehingga membuat rendahnya produktivitas yang berimplikasi terhadap rendahnya pendapatan yang di terima masyarakat.¹⁰

Secara umum, sebagian besar masyarakat Lampulo ketergantungan dari pendapatan nelayan, berdagang dan juga bantuan dari pemerintahan. Dari data yang di akses oleh peneliti melalui website Sistem Informasi Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi¹¹ jumlah kepala keluarga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjumlah 150 keluarga, penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan

⁹ Ir. Gusmeri, M. T. D. (2019). *Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh*.

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Alta Zaini selaku kepala desa lampulo, pada tanggal 9 Oktober 2022

¹¹ Kementerian Desa, PDT Dan Transmigrasi. 2022. "Sistem Informasi Desa".<https://kemendes.go.id/> di akses pada tanggal 11 Oktober 2022

(PKH) sebanyak 71 Keluarga, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 153 keluarga dan penerima bantuan BBM sebanyak 133 keluarga. Hal ini bisa menjadi indikator bahwa angka keluarga miskin di Gampong Lampulo masih tinggi.

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan berfokus pada strategi pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan supaya bisa mewujudkan program SDGs di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Untuk Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemerintah gampong Lampulo dalam mengatasi kemiskinan untuk mewujudkan Program *Sustainable development Goals* (SDGs)?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah gampong lampulo dalam pencapaian tujuan penerapan SDGs ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana strategi pemerintah gampong Lampulo dalam mengatasi kemiskinan untuk mengujudkan Program Sustainable development Goals (SDGs)?
2. Untuk mengetahui Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah gampong lampulo dalam pencapaian tujuan penerapan SDGs ?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat di jadikan sebagai pengembangan referensi ilmu baru dan wawasan keilmuan tentang strategi pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

2. Secara praktis

a. Bagi pemerintah desa Lampulo

Penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan pikiran, masukan bagi instansi pemerintah desa yang mengenai pengetasan kemiskinan di gampong lampulo mengenai bagaimana strategi pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

b. Bagi penulis

Dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman baru bagi penulis bagaimana strategi pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

c. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi untuk masyarakat betapa pentingnya strategi pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa lampulo, pemerintah desa lampulo yang berkaitan langsung dalam penanganan masalah kemiskinan itu semua dalam rangka memberikan

perhatian penuh kepada masyarakat agar permasalahan kemiskinan di desa lampulo cepat teratasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dasar dari penelitian ini, peneliti memiliki tiga penelitian terdahulu untuk menjadi landasan acuan yang relevan bagi peneliti, dengan memiliki tujuan sebagai acuan dapat memperkuat si peneliti dalam meneliti hal yang terkait dengan penelitian ini.

1. judul : Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan.
Di susun oleh : Ayu Oktaviani Musri,
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.¹²

Perbedaan skripsi peneliti adalah penelitian ini melihat bagaimana dinas sosial kota pekan baru dalam mengatasi masalah kemiskinan. Pada penelitian ini dinas sosial pekan baru sudah cukup berhasil dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di pekanbaru, karena dinas sosial pekan baru lebih memprioritaskan program BPNT, PIP, PIS dan PKH dalam mengatasi kemiskinan di kota tersebut. Dengan program tersebut dinas sosial pekan baru berhasil mengurangi kemiskinan sebanyak 18.461 ribu namun ada implementasi program yang tidak searah atau sesuai dengan prosedur dan

¹² Ayu Oktaviani Musri, 2020. *Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan*. Skripsi s1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

banyak masyarakat miskin yang tidak tepat sasaran. Yang membedakan lainnya pada subjek dan penelitian yang berbeda

a) subjek dan objeknya: subjek skripsi ini adalah Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan dan objeknya adalah implementasi tugas dan peran dinas sosial pekanbaru dalam mengurangi kemiskinan.

b) Adapun masalah yang di bahas dalam skripsi yaitu: bagaimana pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan.

2. judul : Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* Di Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Disusu oleh : Musfira Basri

Universitas : Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022.¹³

Perbedaan skripsi peneliti adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rencana strategi yang di lakukan oleh kantor Desa somba Palioi dalam mengelola dana desa dalam mengujudkan *Sustainable Development Goals*. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang di gunakan dalam pengelolaan dana desa sudah cukup baik dengan menekankan strategi

¹³ Musfira Basri, 2022. Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* Di Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Skripsi S1.

yang cukup baik dan terarah sesuai dengan peraturan yang ada. Yang membedakan lainnya adalah pada subjek dan peneliti yang beda.

a) Subjek dan objeknya: subjek skripsi ini adalah strategi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*. dan objeknya adalah untuk mengetahui rencana strategi yang dilakukan pemerintah desa Somba Palioi dakma mengelola dana desa.

b) Adapun masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah strategi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*. di desa somba polioi kecamatan kindang kabupaten bulukumba.

3. judul : Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas).

Disusun Oleh : Wulan Budinigsih

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 2019.¹⁴

Perbedaan skripsi peneliti adalah penelitian ini mengarah kepada bagaimana program pemberdayaan masyarakat yang di laksanakan oleh pemerintah desa melung dengan menggunakan dana desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan. Selain itu subjek penelitian ini berbeda.

4. judul : Mengawal *Sustainable Development Goals* (Sdgs) Meluruskan Orientasi Pembangunan Yang Berkeadilan.

¹⁴ Wulan Budinigsih, 2019. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Skripsi s1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

disusun oleh : Muhammad Fardan Ngoyo

universitas : Universitas Islam Alauddin Makasar.¹⁵

Hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa untuk mengawal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan SDGs, oleh karena itu partisipasi masyarakat harus di izinkan lebih terbuka. Yaitu dengan cara pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA) Dan Sustainable Livelihood Approach (SLA)* agar bisa menyelesaikan masalah mendasar yang masyarakat hadapi dalam proses pembangunan.

2.2 Landasan Teori

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian perlu adanya pedoman dasar berfikir, yaitu sebuah kerangka teori yang berfungsi sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari segi peneliti menyoroiti masalah yang akan di pilih. Teori adalah serangkaian konsep, kontruksi, definisi, asumsi dan proposisi untuk mencari suatu fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan dan konsep. Adapun kerangka teori yang menjadi landasan berfikir peneliti dalam penelitian ini adalah:

2.2.1 Teori Strategi

Teori strategi menurut Fren R. David mendefinisikan strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumbe daya perusahaan dalam jumlah besar. Strategi mempengaruhi perkembangan jangka

¹⁵ Muhammad Fardan Ngoyo, 2015. mengawal *sustainable development goals (SDGs)* meluruskan orientasi pembangunan yang berkeadilan. skripsi.

panjang dan berorientasi terhadap masa depan. Strategi mempunyai kosekuensi multifungsional dan multidivisional serta pula mempertimbangkan baik faktor internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi. Berikut tahapan atau langkah-langkah dalam menentukan sebuah strategi menurut david:¹⁶

1) Perumusan strategi

Perumusan strategi merupakan tahapan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan internal, yang di mulai dari perumusan visi dan misi, untuk mengidentifikasi peluang dan acaman bagi organisasi eksternal. Penetapan tujuan jangka Panjang, pemilihan strategi, dan perumusan alternatif strategi guna untuk mencapai tujuan.

2) Implementasi strategi

Implenetasi strategi merupakan lanjutan tahapan perumusan strategi yang jelas. Penerapan strategi bertujuan untuk pengambilan keputusan dalam memutuskan tujuan tahunan, memotivasi karyawan, merumuskan kebijakan, dan mengelola sumber daya agar strategi yang telah di terapkan dapat di laksanakan.

3) Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah tahapan akhir yang sangat di perlukan dalam menentuak bahwa strategi tertentu ditak berjalan dengan bail. Evaluasi

¹⁶ David, F. R. 2017. *Manajemen Strategi Suatu Pendekaan Keunggulan Bersain*. Jakarta: Selemba Empat

strategi adalah alat sangat di butuhkan dalam memperoleh informasi. Yang di lakukan dengan mengevaluasi strategi atau melaksanakan proses strategi.

Adapun tiga aktivitas penilaian strategi yang mendasar :

- a) Peninjauan ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini.
- b) Pengukuran kinerja.
- c) Pengambilan langkah kolektif.

2.2.2 Definisi Strategi

Kata strategi secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani *strategos* atau *strateus* dengan kata jamak strategi. *Strategos* sendiri memiliki *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.¹⁷ Penggunaan kata *strategos* itu dapat di artikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh dengan menggunakan cara efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki. George Steiner mengartikan strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan. Strategi adalah rencana jangka Panjang untuk mencapai suatu tujuan. Strategi terdiri dari kegiatan penting yang di butuhkan untuk mencapai tujuan.¹⁸

Definisi strategi menurut Chandler adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan yang berkaitan dengan tujuan jangka Panjang, rencana tidak lanjut, dan

¹⁷ Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo. Hlm 101

¹⁸ Rachmat. 2014. *Manajemen Strategik*. Bandung: Pustaka Setia. Hal 2

prioritas alokasi sumber daya.¹⁹ Sedangkan menurut Argyris, strategi merupakan respon eksternal yang berkelanjutan dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.²⁰

Menurut Hamel dan Prahalad, strategi adalah Tindakan bertahap (meningkat) yang pelaksanaannya berdasarkan pada perspektif harapan pelanggan di masa depan. Oleh karena itu, perencanaan strategis hamper selalu di mulai dengan “apa yang mungkin terjadi” dari pada “apa yang terjadi”. Kecepatan inovasi dari pasar baru dan perubahan model konsumen dengan daya saing inti. Perusahaan perlu menemukan daya saing inti dalam proses menjalankan bisnis.²¹

2.2.3 manajemen strategi

Menurut Certo, 2010 mendefinisikan manajemen strategi adalah analisis, pengambilan keputusan dan Tindakan yang di ambil oleh perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Definisi ini menjelaskan dua elemen utama dari manajemen strategis. Elemen pertama, manajemen strategi perusahaan terkait dengan analisis, pengambilan keputusan, dan proses Tindakan yang sedang berlangsung. Manajemen strategis melibatkan bagaimana manajemen menganalisis tujuan strategis (visi, misi, tujuan) dan kondisi internal dan eksternal yang dihadapi perusahaan. Selain itu, perusahaan harus

¹⁹ Rangkuti, Freddy. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm 3

²⁰ *Ibid.*., hlm 4

²¹ Andiny Indah Purnamasari, “Strategi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintang dalam Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat,” (jurnal), (Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016), hlm. 7

mengambil keputusan strategis. Keputusan tersebut harus mampu menjawab dua pertanyaan utama yaitu industry tersebut. Akhirnya, Langkah-langkah di ambil untuk mengimplementasikan keputusan tersebut. Tindakan yang diperlukan akan mendorong manajemen untuk mengalokasikan sumber daya dan merancang organisasi untuk mengujuskan rencana tersebut.

Element kedua, manajemen strategis adalah studi tentang mengapa suatu perusahaan dapat mengalahkan perusahaan lain. Manajemen perlu menentukan bagaimana perusahaan tidak hanya menciptakan keunggulan kompetitif yang unik dan berharga, tetapi juga sulit untuk meniru atau mencari alternatif untuk membuatnya berkelanjutan untuk waktu yang lama. Keunggulan kompetitif jangka Panjang biasanya diperoleh dengan melakukan aktivitas yang sama dengan cara yang berbeda.

Menurut solihin manajemen strategis mengacu pada proses perencanaan, pengorganisasian, pembinaan, dan pengendalian berbagai keputusan dan Tindakan strategis perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif.²² Sedangkan menurut sofyan manajemen strategis adalah proses pengambilan keputusan yang menggunakan sumber daya perusahaan seefisien mungkin dalam kondisi lingkungan perusahaan yang terus berubah.²³

Manajemen strategi adalah suatu proses yang di gunakan oleh manajer dan karyawan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategu dalam penyediaan

²² Solihin, Ismail. 2012. *Manajemen Strategik*. (Jakarta: Penerbit Erlangga) hlm. 64

²³ Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi 1-10. (Jakarta: Rajawali Pers) hlm. 4

customer value terbaik untuk mengujudkan visi organisasi. Menurut wheelen, 2010. Manajemen strategi adalah serangkaian dari pada keputusan manajerial dan keinginan-keinginan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka Panjang, kegiatan tersebut terdiri dari perumusan atau perencanaan strategis, pelaksanaan dan evaluasi.

Manajemen strategi dalam implementasinya di tentukan oleh tahapan indentifikasi lingkungan (internal dan eksternal), perumusan strategi, implementasi strategi, pemantauan dan evaluasi strategi. Hal tersebut di susun dari system lingkungan yang terdiri dari analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan: kapabilitas, sumber daya, dan kompetensi inti) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang di kenal sebagai SWOT maupun pendekatan peran (*policy*, strategi dan fungsi) untuk mengatahui factor-faktor yang mempengaruhi, baik secara luas maupun spesifik, seperti:²⁴

- a. Masuknya pendaang baru (skala ekonomi, doferensiasi produk, persyaratan modal, biaya peralihan pemasok, akses ke saluran distribusi, kebijakan pemerintah dan lainnya).
- b. Kekuatan tawar menawar pembeli
- c. Ancaman produk pengganti (harga/biaya)
- d. Kekuatan tawar menawar pemasok

²⁴ Zuriani Ritonga, *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori dan Aplikasi)*. (Yogyakarta: Deepublish. 2020), hal. 49

Manajemen strategi merupakan sebuah proses yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain perumusan strategi, implemetasi strategi dan evaluasi strategi. Perumusan strategi terdiri dari kegiatan-kegiatan pengembangan bisnis, mencari peluang bisnis, dan acaman dari perusahaan luar. Keputusan perumusan strategi meningkat suatu organisasi pada pasar, produk, sumber daya, dam teknologi spesifik selama priode waktu tertentu.²⁵

2.2.4 Aspek-Aspek Strategi

Menurut sukanto reksohadiprodjo, aspek-aspek manajemen strategi antara lain pengungkapan visi dan misi badan usaha, penentuan tujuan-tujuan, menciptakan strategi mengimplementasikan dan melaksanakan strategi, serta menilai kinerja dan melaksanakan penyesuaian-penyesuaian serta Tindakan korektif.²⁶ Sedangkan menurut Thompson dan Strickland dalam bukunya *Strategic Management* yang telah di ubah dalam Bahasa Indonesia, secara umumnya manajemen strategi memiliki aspek-aspek strategis yang senantiasa di pertimbangkan dalam menentukan strategis yang akan di laksanakan. Aspek-aspek tersebut antara lain:

- a. Mengembangkan Visi Dan Misi Organisasi

Organisasi perlu adanya misi mengenai arah dan tujuan organisasi tersebut.

Misi tersebut menjawab pernyataan: apakah alasan kita untuk berada dalam

²⁵ *Ibid.*, hal 15

²⁶ Sukanto Reksohadiprodjo, *Manajemen Strategi Edisi 4*, (Yogyakarta: BPFE, 2003) hal 55-

usaha ini? Dan penting bagi manajemen untuk mengidentifikasi secara terkini yang ada strategi yang sekarang di gunakan.²⁷

b. Mengatur Tujuan Organisasi

Mengetahui kelebihan dulu apa yang menjadi tujuan organisasi itu berdiri, sebelum merumuskan strategi dan sebagainya.

c. Merumuskan Strategi Organisasi

Para manajer perlu Menyusun dan mengevaluasi berbagai alternatif strategi dan kemudian memilih strategi-strategi yang saling mendukung dan melengkapi serta strategi yang memungkinkan organisasi mampu memanfaatkan kekuatan dan peluang lingkungannya yang paling baik.

d. Mengimplementasikan dan melaksanakan strategi

Setelah stategi dirumuskan, strategi harus di implementasikan. Stategi hanya bagus jika implementasinya bagus. Tanpa peduli betapa efektifnya organisasi telah merencanakan strateginya, organisasi tersebut tidak dapat berhasil jika strategi itu tidak di implementasikan dengan semestinya.

e. Mengevaluasi hasil, memonitoring perkembangan, dan membuat perbaikan dan penyesuaian strategi.

Langkah terakhir dalam aspek manajemen strategi adalah mengevaluasi hasil. Seberapa efektif strategi yang telah terlaksanakan?. Apapun hasilnya akan menjadi

²⁷ Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen*, (Jakarta: Indeks, 2004) hal 197

rekomendasi masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan strategi dan implementasi berikutnya dan jika ada, penyesuaian apa yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing organisasi terhadap perkembangan baru.²⁸

2.2.5 Kemiskinan

Perpres Nomor 13 tahun 2009 tentang penanggulangan kemiskinan, menjelaskan bahwa pembahasan tentang kemiskinan harus menggunakan pendekatan berbasis hak. Dalam pengertian ini, harus diakui semua masyarakat baik laki-laki atau perempuan memiliki hak yang sama. Oleh karena itu jika ada seorang atau sekelompok laki-laki dan perempuan yang terpenuhi hak-hak dasarnya untuk memelihara dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat itu adalah kemiskinan. Kemiskinan juga dilihat sebagai masalah multidimensi, tidak lagi dipahami hanya sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi sebagai kegagalan seseorang atau sekelompok orang untuk hidup bermartabat dan untuk mencapai hak-hak dasar dan perlakuan yang berbeda.²⁹

Menurut Emil Salim kemiskinan merupakan suatu permasalahan dimana masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, dan mereka berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapat mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan menurut John Kenneth Galbraith, berpendapat bahwa kemiskinan adalah sebagai akibat dari mengatur perputaran roda perekonomian secara lebih baik.

²⁸ *Ibis...*, hal 10

²⁹ Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm.

Kemiskinan sebagai akibat dari persaingan bebas yang tidak bisa dikendalikan.³⁰ Menurut sajogyo, kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.³¹

Secara umum, kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan absolut, dan kemiskinan structural. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang berkaitan dengan kesenjangan antara distribusi pendapatan dan distribusi rata-rata, yaitu pendapatan berada di atas garis kemiskinan, tetapi relative lebih rendah dari pendapatan masyarakat sekitar. Kemiskinan kultural adalah fokus pada sikap individua tau masyarakat karena faktor budaya seperti kemalasan, kebodohan, kurangnya kreativitas, dan lain-lain, yang mengarah kepada kemiskinan. Kemiskinan absolut adalah tingkat ketidakmampuan seseorang atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan minimum seperti pangan, sadang, Kesehatan, Pendidikan dan perumahan untuk hidup dan bekerja. Kemiskinan struktural adalah kondisi dimana kemiskinan menyebabkan ketimpangan pendapatan akibat kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Hal ini disebabkan rendahnya akses terhadap sumber daya.³²

Emil salim memberikan ciri-ciri masyarakat dibawah garis kemiskinan menurut skala bank dunia sebagai berikut: pertama, mereka tidak memiliki faktor

³⁰ Junaidin Zakaria, "Pengantar Teori Ekonomi Makro", (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 95-96

³¹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...* hlm.72

³² Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. hlm. 84

produksi sendiri seperti lahan, modal dan keterampilan yang cukup, sehingga tidak dapat menghasilkan pendapatan. Tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh sendiri keterampilan untuk menghasilkan aset. Penghasilan tidak cukup untuk mendapatkan tanah Garapan atau modal usaha. Surat untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan harus memiliki jaminan kredit. Ketiga, tingkat Pendidikan yang rendah juga bisa menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan yang tidak stabil atau rendah, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keempat, mereka kebanyakan tinggal di pedesaan yang tidak memiliki atau terbatas lahan. Banyak dari mereka menjadi musiman, sehingga pekerjaan mereka terputus-putus dan tidak menjamin pekerjaan mereka. Kelima, sedangkan yang tinggal dikota kebanyakan dari mereka tidak memiliki skil yang baik untuk bisa bekerja di industry sedangkan untuk bekerja di industry harus mempunyai keterampilan yang baik. Oleh sebab itu mereka tidak memiliki peluang yang besar untuk bisa bekerja di sektor tersebut. Sehingga keberadaan mereka di kota bisa menyebabkan masalah lain.³³

Penanggulangan kemiskinan merupakan program utama dari UU No. 25 tahun 2000 tentang rencana pembangunan nasional 2000-2004 oleh karena itu pemerintah Indonesia telah membentuk badan koordinasi penanggulangan kemiskinan (BKPK) yang misi utamanya adalah mengembangkan diskursus dan mendorong lembaga pemerintah pusat dan daerah, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, lembaga legislative, dan administratif untuk melaksanakan paradigma baru dalam mengatasi

³³ Junaidin Zakaria, "Pengantar Teori Ekonomi Makro".hlm. 95

kemiskinan, menggunakan orang miskin sebagai aktor untuk pengetasan kemiskinan mereka sendiri.³⁴

2.2.5.1 Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Bentuk kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan kriteria tingkat pendapatan, di antaranya adalah

- 1) Kemiskinan absolut, jika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan. Dapat di pahami bahwa pendapatan seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup. Kebutuhan minimum harus mencakupi kebutuhan pangan, papan, sandang, dan Pendidikan.
- 2) Kemiskinan relative atau struktural, jika pendapatan seseorang tidak termasuk kedalam garis kemiskinan tetapi jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitar tergolong rendah. Kemiskinan relatif, berkaitan erat dengan permasalahan pembangunan yang bersifat struktural.
- 3) Kemiskinan kultural, adalah kemiskinan dimana seseorang atau masyarakatnya tidak mau merubah kondisi ekonominya untuk menjadi lebih baik meskipun ada yang membantunya. Mereka lebih pasrah menerima apa yang sudah mereka miliki, kelompok masyarakat ini sulit mengalami perubahan karena susah untuk di arahkan untuk memperbaiki ekonominya.³⁵

³⁴ Abdul Bashith, "*Ekonomi Kemasyarakatan*". hlm.74-76

³⁵ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan...*, 82

Bentuk kemiskinan berdasarkan sifatnya, Adapun kemiskinan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu:³⁶

- 1) Kemiskinan alamiah. Adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam atau tidak adanya pra sarana umum seperti air bersih, jalan raya, listrik dll. Dan juga tidak memiliki tanah yang subur untuk Bertani. Daerah yang memiliki kriteria seperti ini biasanya daerah yang jauh/sulit di jangkau oleh karena itu sulit bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan
- 2) Kemiskinan buatan. Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang terjadi karena sistem pembangunan yang mengikuti modernisasi dimana masyarakat tidak memiliki kesempatan dalam menguasai sumber daya, sarana, serta fasilitas ekonomi secara merata. Kosep ini juga berdampak negative bagi negara berkembang karna konsep pembangunan yang umumnya di terapkan di negara-negara sedang berkembang. Konsep ini juga berdampak pada pembangian hasil yang tidak merata keuntungan yang di dapat pada sektor industri lebih tinggi dari pada mereka yang bekerja sebagai petani.

2.2.5.2 Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan menurut Pusat Statistik (BPS) merupakan kemiskinan diukur menggunakan konsep (*Basic need approach*) yaitu kemampuan memenuhi

³⁶ Elvira Handayani Jacobus, Paulus Kindangen, Een N. Walewangko, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara*, (Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol.19, No.7, 2018), 5.

kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dari sisi pengeluaran.

Bila di uraikan indikator kemiskinan itu ada beberapa hal di antara yaitu:

- 1) Penduduk miskin. Penduduk miskin adalah penduduk dengan pendapatan dibawah rata-rata yang di ukur dari pengeluaran per kapita per bulan. Banyaknya penduduk miskin yang mendiami suatu wilayah maka di maknai sebagai jumlah penduduk miskin suatu wilayah.
- 2) Garis kemiskinan. Ini merupakan perjumlahan dari garis kemiskinan makanan, pengeluaran minimum makanan dan minuman setara dengan 2100 kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan disebut dengan garis kemiskinan. Untuk menghitung besarnya garis kemiskinan menggunakan formula $GK = \text{Garis Kemiskinan Makanan (GKM)} + \text{Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM)}$.
- 3) Persentase Kemiskinan (Tingkat Kemiskinan). Sebuah gambaran tentang perbandingan penduduk miskin dalam suatu wilayah dengan persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan merupakan definisi dari tingkat kemiskinan.³⁷

Selain tiga indikator diatas terdapat indikator lain yang tidak kalah penting yakni indikator kemiskinan dari sudut pandang non moneter. Indikator tersebut di antaranya adalah:

³⁷ Elly Suryani, *Indikator kemiskinan yang harus dipahami orang awam*

1. Pendidikan

Untuk mengukur kemiskinan dalam bidang Pendidikan memerlukan beberapa indikator diantaranya yaitu:

- a. Angka melek huruf, yaitu perbandingan penduduk yang bisa menulis dan membaca dalam Bahasa latin, di mulai dari 15 tahun ke atas.
- b. Angka partisipasi sekolah, merupakan perbandingan dari jumlah seluruh penduduk yang masih duduk di bangku sekolah dari berbagai umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24)
- c. Angka putus sekolah, adalah perbandingan penduduk yang tidak menyelesaikan sekolah dasar dan terdaftar di semua Pendidikan. Usia 7 tahun hingga 15 tahun.

2. Ketenagakerjaan

Dari sisi ketenaga kerjaan kemiskinan diukur dari penduduk yang bekerja menurut jam kerja dan pekerjaan informan.

3. Fertilitas dan harapan hidup

Faktor ini sangat mempengaruhi jumlah penduduk secara positif berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk sedangkan secara negative berdampak pada kekurangannya jumlah penduduk.

4. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Kondisi kesehatan dapat dilihat dari sisi individu, keluarga dan lingkungan. Indikator kesehatan individu adalah pemberian

imunisasi pada balita, tenaga kesehatan yang menolong persalinan, dan keikutsertaan KB.

Menurut kuncaro, penyebab kemiskinan adalah:

- a. Secara mikro, kemiskinan karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distriusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang rendah, berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya sumber daya ini di karenakan rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.
- c. Kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*). Adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, dan kurangnya modal mengakibatkan kurangnya produktifitas sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.³⁸

2.2.5.3 Faktor Faktor Kemiskinan

1. Pendidikan Yang Rendah

³⁸ Rudi Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah....* Hlm. 177

Salah satu faktor kemiskinan adalah Pendidikan yang rendah. Di era globalisasi sekarang manusia di tuntut untuk bisa melakukan segala hal oleh karena itu Pendidikan yang tinggi sangat di perlukan oleh masyarakat. Karena dari Pendidikan masyarakat bisa mempunyai ketrampilan yang bisa di pakek dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

2. Tidak Merata Pembangunan Ekonomi

Kemiskinan juga dikarenakan oleh tidak meratanya pembangunan, perputaran ekonomi tidak boleh berfokus pada satu pusat saja karna bisa terjadi ketimpangan pada tempat lain. Pemerintah harus melakukan pembangunan yang merata kesetiap daerah agar tidak berdampak pada tingkat kemiskinan, karena Ketika suatu kota tidak memiliki akses yang bagus menuju kota lain maka akan berdampak pada harga pangan, sandang, dan papan di kota tersebut.

3. Sumber Daya Manusia Kurang Merata

Ini dikarenakan oleh rendahnya Pendidikan, padahal di era sekarang untuk mendapatkan ilmu atau ketrampilan sangatlah mudah, tinggal mengikuti seminar-seminar yang di selenggarakan oleh pemerintah ataupun organisasi, banyak pelatihan keterampilan yang di buat oleh pemerintah, maka dari itu masyarakat harus bisa memanfaatkan peluang tersebut guna untuk meningkatkan keterampilan.

4. Kurang Mendukung Terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Banyak masyarakat Indonesia yang kreatif dalam membuat produk, kita sebagai masyarakat harus mendukung produk yang di buat oleh

pengerajin kita sendiri jangan membandingkan produk lokal dengan luar, karena kebiasaan masyarakat Indonesia menyepelkan terhadap karya dalam negeri, yang seharusnya kita sebagai warga Indonesia harus mendukung penuh untuk memajukan perekonomian Indonesia.

5. Tidak Tepatnya Subsidi

Maksud dari faktor ini adalah banyak subsidi yang tidak tepat sasaran, Sebagian masyarakat kita juga harus sadar dalam membeli sesuatu barang kebutuhan jika merasa mampu jangan lagi membeli barang yang di subsidi pemerintah, karena memberi efek yang sangat besar kepada masyarakat yang seharusnya menerima subsidi tersebut.

2.2.5.4 Indeks Kemiskinan

Argumen umum yang digunakan oleh UNDIP (*United Nations Development Program*) adalah bahwa tolak ukur kemiskinan seseorang adalah jika dia tidak mampu menjangkau (atau tidak punya akses) terhadap saran public dasar dan tingkat kualitas hidup mereka sendiri rendah. Menurut UNDIP, ada tiga pokok yang menentukan tingkat kemiskinan, yaitu:

- a. Tingkat kehidupan, dengan asumsi bahwa karena tingkat Kesehatan yang begiturendah, sehingga lebih dari 30% penduduk negara-negara terbelakang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun.
- b. Tingkat Pendidikan dasar diukur oleh persentase penduduk usia dewasa yang buta huruf, dengan beberapa penekanan tertentu, misalnya hilangnya hak pendidik pada kaum wanita.

- c. Tingkat keamanan ekonomi, diukur oleh persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap prasarana Kesehatan dan air bersih, serta persentase anak-anak dibawah usia lima tahun yang kurang gizi.³⁹

2.2.5.5 Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda utama Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional 2000-2004. Untuk mendukung hal itu, pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) yang mempunyai tugas untuk mengembangkan diskursus serta untuk mendorong instansi pemerintahan pusat dan daerah, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, Lembaga legislative dan eksekutif serta Lembaga lain yang menetapkan masyarakat miskin sebagai actor untuk mennggulangi kemiskinannya sendiri.⁴⁰

Adapun kebijakan pengetasan kemiskinan, antara lain:

- a. Pembangunan sumber daya manusia

Di Indonesia atau mungkin dimana saja, Pendidikan (baik formal maupun non formal) dapat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang baik secara tidak langsung, yaitu mulai perbaikan produktifitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung, yaitu melalui pelatihan golongan miskin dengan bekal keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktifitas mereka yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapat mereka.

³⁹ Lancolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan....* hlm.69-71

⁴⁰ *Ibid....*hlm.305

b. Pembangunan pertanian dan pedesaan

Sektor pertanian sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ada tiga aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengurangan kemiskinan tersebut. Terutama di daerah pedesaan. Kontribusi terbesar dalam meningkatkan pendapatan penduduk desa dan pengurangan kemiskinan pedesaan dihasilkan dari adanya revolusi teknologi dalam pertanian.

c. Peran Lembaga swadaya masyarakat

Keterlibatan aktif dari LSM dalam program-program pemerintah cenderung untuk meningkatkan penerimaan masyarakat pedesaan terhadap program-program pemerintah dan akhirnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan LSM juga meningkatkan biaya financial dan staf dalam pengimplementasian program padat karya untuk mengurangi angka kemiskinan.⁴¹

2.2.6 Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep SDGs merupakan hasil dari kegiatan konferensi di Rio de Janeiro yang dilakukan oleh PBB yang pada tahun 2012 berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Konferensi ini diselenggarakan dengan maksud dapat mencapai tujuan

⁴¹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan....* Hlm. 307-309

Bersama yakni mampu menjaga keseimbangan tiga hal pokok dalam membangun keberlanjutan meliputi lingkungan, social dan ekonomi.⁴²

Guna mencapai tiga hal pokok dalam pembangunan berkelanjutan tersebut SDGs mempunyai 5 asas utama yaitu manusi, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan untuk mengujudkan tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa pengentasan kemiskinan, mencapai kesetaraan serta mengatasi perubahan iklim. Demi mencapai tiga tujuan mulia tersebut disusunlah 17 tujuan global.⁴³ yang memiliki 169 sasaran di mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2030 mendatang. Dokumen tersebut dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

SDGs merupakan program lanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang disepakati oleh 193 negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir tersebut berakhir pada tahun 2015. Akan tetapi kedua program tersebut memiliki perbedaan baik dari segi penyusunan ataupun substansinya. MDGs sendiri berisi 8 poin dan 21 sasaran dari 60 indikator, yang bertujuan meminimalisir kemiskinan hingga setengah dari penduduk dunia.

Sedangkan, SDGs membantu masalah-masalah pembangunan secara lebih baik (dengan mengakomodir isu pembangunan yang belum ada pada program MDGs) SDGs juga bersifat global dengan memberikan kedudukan yang seimbang kepada seluruh negara, baik negara berkembang, negara kurang berkembang, dan negara

⁴² Armida Salsiah Alisjahbana, dkk, *Menyongsong SDGS Kesiapan Daerah-Daerah Di Indonesia...*, 3

⁴³ Alfajri, dkk, *Pelatihan dan Pemberdayaan Tunas Sustainable Development Goals (SDGs) Siswa Tingkat SMA/MA Sederajat Di Kota Pekanbaru Untuk Mewujudkan Tujuan Sustainable Cities And Communities Dan Responsible Consumption And Production*, (Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin, Vol.4, No. 2, 2020), 127.

maju supaya bisa berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan, maka dari itu setiap negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencapai SDGs.

Konsep SDGs sendiri lahir dari kegiatan *United Nations Conference on sustainable development* di Rio de Janeiro pada tahun 2012, yang memiliki tujuan utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang universal yang dapat menjaga tiga keseimbangan dimensi yaitu, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk menjaga keseimbangan ketiga dimensi pembangunan tersebut, SDGs memiliki 5 landasan utama yaitu kesejahteraan, planet, manusia, kemitraan, kedamaian dan keinginan untuk mencapai tiga tujuan mulia pada tahun 2030 berupa pengentasan kemiskinan, kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Selain dua capaian lainnya, kemiskinan tetap menjadi isu yang signifikan yang harus di selesaikan, maka dari itu disusunlah 17 tujuan universal.

Menurut Sachs dalam bukunya Armida Salsiah Alisjahbana, dasar dari pembangunan berkelanjutan adalah memiliki keseimbangan dari ekonomi, masyarakat, lingkungan, dan pemerintah. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang pesat harus di iringi dengan pemerataan pendapatan melalui implementasi di lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang layak. Di lihat dari sisi lain pertumbuhan ekonomi harus menyadari dampak lingkungan mereka dengan tidak mencemari udara atau menghabiskan sumber daya alam. Akhirnya keberadaan pemerintahan yang baik sangat penting untuk mencapai sasaran-sasaran yang di kehendaki. Karena fungsi-

fungsi dari kehidupan kita hanya bisa di penuhi oleh pemerintah seperti insfrastruktur, jaminan kesehatan nasional, dan regulasi.⁴⁴

Pemerintah Indonesia Pada tahun 2020 mengeluarkan program baru yang dikenal dengan SDGs Desa, program tersebut merupakan program turunan dari SDGs nasional dimana hal tersebut sabagai cara untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan kesetaraan yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki desa sebanyak 74.943 desa. Bisa disebutkan Sebagian besar wilayah Indonesia adalah pendesaan. Oleh karena itu penting untuk melakukan pembangunan di wilayah pendesaan.

SDGs Desa dalam Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang memprioritaskan penggunaan dana desa tahun 2021 secara lebih maksimal yang diartikan sebagai upaya terpadu melahirkan desa tanpa adanya kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi yang tumbuh merata, desa peduli dengan Kesehatan, desa yang ramah lingkungan, desa peduli Pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dapat dilihat bahwa SDGs Desa memiliki 7 model desa yang akan dibangun oleh pemerintah melalui program SDGs Desa berdasarkan permasalahan kemiskinan yang terjadi di desa. Hal menunjukan bahwa desa diIndonesia setidaknya memiliki

⁴⁴ Armida Salsiah Alisjahbana, ddk, *Menyongsong SDGS Kesiapan Daerah-Daerah Di Indonesia...*,5-6.

tujuh pokok masalah yang harus diselesaikan dan ditangani sebaik mungkin. Jawaban yang diberikan oleh pemerintah ialah program SDGs Desa.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Untuk Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Oleh karena itu peneliti ini menggunakan metode Kualitatif dan analisis Komparatif. Dengan menerapkan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti bisa tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis fenomena dan mendeskripsikan suatu peristiwa, sikap, aktifitas sosial, kepercayaan, pemikiran orang secara kelompok maupun individu.⁴⁵ Sedangkan Analisis komparatif adalah penelitian yang melakukan dua gejala atau lebih.⁴⁶ Data yang sudah diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan jawaban terhadap suatu persoalan yang muncul.

3.2 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini bertujuan untuk membatasi dan memperkecil ruang penelitian guna dapat membahas dan mengumpas secara terperinci dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11

⁴⁶ Ulber Silalahi, *Metode penelitian sosial*, Bandung: Unpar Press, 2006, Hal. 39

Aceh, Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan masalah kemiskinan yang masih tinggi dengan persentase kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 12,43% di bandingkan pada tahun 2018 yang hanya 10,27% padahal dana desa yang di berikan oleh pemerintah pusat sangatlah besar untuk menanggulangi kemiskinan mencapai 1.020.644.000 Oleh karena itu, peneliti ingin lebih mendalam lagi dalam melihat strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah gampong lampulo dalam menanggulangi kemiskinan untuk mewujudkan program SDGs.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data penelitian adalah

- Data primer adalah data yang langsung di peroleh oleh peneliti dari objek penelitian seperti dari kelompok, organisasi ataupun perorangan. Oleh karena itu data primer didapatkan melalui observasi, wawancara, langsung dengan komunikasi. Sumber data primer yang di pakai untuk menghimpun data bersumber dari masyarakat dan perangkat desa yang berdomisili di gampong lampulo.
- Data skunder, adalah data yang di peroleh penelitian secara tidak langsung yaitu melalui media perantara seperti skripsi, junal, buku, arsip dan catatan. yang di jadikan sebagai referensi berdasarkan kajian penelitian ini.

3.4 Informan Penelitian

untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid, maka di butuhkan informasi yang tepat dan akurat. Adapun untuk informan untuk permasalahan ini sebagai berikut:

No	Nama Informan	Jabatan
1	Alta Zaini	Keuchik Lampulo
2	Bahrul Ikhsan, S.Kel	Sekretaris Desa
3	Kiyamuddin	Kaur Keuangan
4	Syarifah Rahmani	Kasi Pelayanan
5	Delfi Meliyana	Kasi Pemerintahan
6.	Reza septinaldi	Kasi urusan umum dan perencanaan
7.	Jalaluddin MPD	Pengurus BUMG
8.	Masyarakat umum	-
9.	Penerima bantuan SDGs dan BUMG	-

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang di lakukan oleh peneliti ada 3 (tiga) cara yaitu:

1. Interview (wawancara)

Wawancara dilakukan dengan kepala desa, perangkat desa, kordinator pendataan SDGs, dan kasi kesejahteraan rakyat yang melaksanakan program SDGs. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan untuk mewujudkan program SDGs.

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi secara lengkap terkait sebuah isu yang ingin di teliti dalam suatu penelitian. Wawancara adalah percakapan antara kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan)⁴⁷

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini ditunjukan pada beberapa pihak, yaitu perangkat desa, pengelola BUMG dan koordinator bagian pendataan program SDGs desa lampulo. Teknik wawancara inilah yang digunakan sebagai Teknik terpenting dalam penelitian ini karena melalui tatap muka secara langsung dengan narasumber untuk menunjang data-data dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk gambar atau tulisan, seperti karya-karya yang sesuai dengan penelitian yang di lakukan. Pada penelitian ini peneliti melakukan metode dokumentasi agar bisa memperoleh data-data yang menjadi sumber yang relevan. Metode dokumentasi juga memiliki kelebihan dalam segi efisiensi tenaga dan waktu. Metode ini gunakan untuk

⁴⁷ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.23

memperoleh data-data penelitian, dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan yang ada relevansinya dengan objek penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung dan pencacatan terhadap Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Untuk Mewujudkan SDGs pada kantor desa gampong lampulo.

Observasi sebagai aktifitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap pancaindra manusia. Teknik pengumpulan data dengan Teknik observasi digunakan apabila, penelitian berkenaan dengan gejala-gejala alam, perilaku manusia, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Berkenaan dengan penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan observasi karena pelaku/aktor, serta pengumpulan data yang akan di cari mengenai proses kerja tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Untuk Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

- Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik

- Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan.

- Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan dilapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Dan Sejarah Singkat Gampong Lampulo

Gampong Lampulo merupakan sebuah desa yang terletak di pinggiran sungai Krueng Aceh yang terhubung dengan laut. Menurut Abdullah Husen, mantan Kepala Lampulo, sungai Krueng Aceh sering mengalami luapan air sehingga mengakibatkan banjir. Kejadian inilah yang menjadi dasar munculnya istilah “lam” (berarti “terendam” dalam bahasa Indonesia). Selain itu, karena lokasi awal Lampulo sebagai kawasan hutan pantai, maka disebut sebagai "pulo" (berarti "pulau" dalam bahasa Indonesia).⁴⁸

Semula gampong ini tergabung dengan Gampong Lampulo Ujong Peunayong, namun kini terpecah menjadi tiga gampong berbeda: Lambisnis, Lampulo, dan Mulia. Pemekaran gampong pertama, Gampong Lambing, terjadi pada tahun 1958 di bawah pengawasan kecamatan Masjid Raya di Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun 1963, pada masa pemerintahan Keuchik Nago, Lampulo Ujong Penayong dipecah, bagian selatan menjadi Gampong Mulia dan bagian utara menjadi Gampong Lampulo.⁴⁹

Penduduk Lampulo sebagian besar terdiri dari nelayan, dan sebagian kecil bekerja di bidang pemerintahan, sektor swasta, perdagangan, dan pekerjaan lainnya. Mayoritas penduduk Gampong Lampulo mengandalkan industri perikanan sebagai sumber pendapatan utama. Hanya sebagian kecil yang mempunyai sumber

⁴⁸ RPJM Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh

⁴⁹ *Ibid*,

pendapatan alternatif selain dari pekerjaan utama mereka. Namun demikian, peraturan yang berkaitan dengan desa sering kali diterapkan, disertai dengan dukungan keuangan yang besar yang dialokasikan ke desa-desa di seluruh Indonesia. Desa Lampulo berharap pendanaan lokal dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan infrastruktur perekonomian desa dan penduduknya, khususnya dalam mengatasi kemiskinan melalui program SDGs.

4.1.1 Keadaan Geografi Gampong Lampulo

a. Letak dan Luas Wilayah

Gampong Lampulo merupakan sebuah pemukiman yang terletak di Kecamatan Kuta Alam, seluas 154,5 hektar. Batasan geografis Gampong Lampulo adalah sebagai berikut:

Utara : Gampong Lamdingin dan Gampong Deyah Raya

Selatan : Gampong Mulia

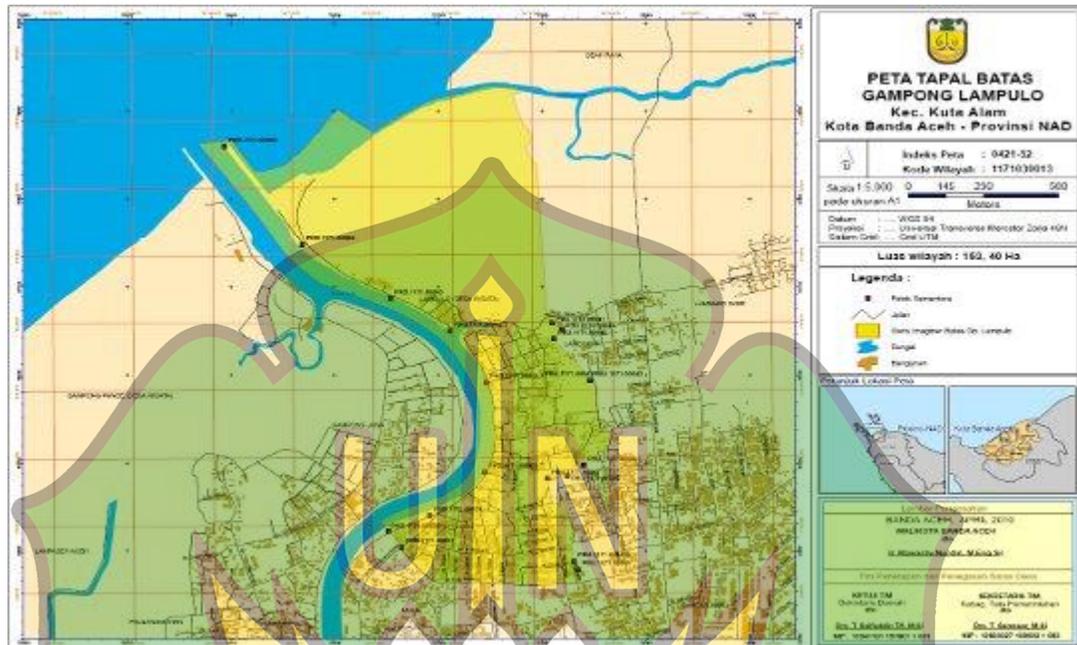
Timur : Gampong Lamdingin

Barat : Krueng Aceh - RANIRY

Terdapat empat dusun di Gampong Lampulo, yaitu:

1. Dusun T. Tuan Dipulo
2. Dusun Malahayati
3. Dusun Tgk. Disayang
4. Dusun T. Teungoh

Gambar 1: Peta Gampong



Gampong Lampulo yang terletak dalam wilayah administratif Kecamatan Kuta Alam memiliki posisi yang menguntungkan sehingga menyumbangkan potensinya di berbagai sektor. Kondisi sosial-ekonomi gampong mempunyai dampak yang minimal terhadap budaya perkotaan. Tiga sektor yakni perdagangan, perikanan, dan pariwisata menjadi penopang utama perekonomiannya. Hal ini terutama disebabkan oleh kedekatan gampong tersebut dengan Kawasan Kota Banda Aceh yang kaya akan sumber daya alam.

4.1.2 Demografi wilayah gampong

Berdasarkan data terakhir pada bulan Maret 2022, jumlah penduduk Desa Lampulo diperkirakan berjumlah sekitar 5443 jiwa. Kawasan ini dibagi menjadi empat dusun berbeda, yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri:

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

Table 4.1
Jumlah Penduduk Gampong Lampulo

No	Dusun	Jumlah penduduk		
		L	P	L+P
1	Dusun I T.Tuan Dipulo	1091	991	2082
2	Dusun II Malahayati	725	774	1499
3	Dusun III Tgk. Disayang	498	442	940
4	Dusun IV T.Teungoh	478	444	922
JUMLAH		2792	2651	5443

Sumber : Data Laporan Gampong Lampulo Kec, Kuta Alam Kota Banda Aceh

2) Berdasarkan Usia

A R - R A N I R Y

Table 4.2

Berdasarkan Kelompok Usia

Usia	Jumlah Jiwa
0-4 Tahun	377
5-9 Tahun	278
10-14 Tahun	346

15-19 Tahun	378
20 -24 Tahun	516
25-29 Tahun	538
30-34 Tahun	515
35-39 Tahun	518
40-44 Tahun	504
45-49 Tahun	420
50-54 Tahun	384
55-59 Tahun	211
60-64 Tahun	201
65-69 Tahun	199
> 70 Tahun	58
Jumlah	5443

Jumlah penduduk Gampong Lampulo pada tahun 2021 sebanyak 5.443 jiwa. Dibandingkan dengan sensus sebelumnya, jumlah penduduk Gampong Lampulo mengalami penurunan. Jumlah penduduk Gampong Lampulo pada tahun 2017 sekitar 5490 jiwa. Secara keseluruhan, 55% penduduk Lampulo terdiri dari pendatang yang memilih menetap di Gampong Lampulo dari berbagai daerah, sedangkan 45% sisanya merupakan penduduk asli Lampulo.

3) Jumlah penduduk menurut Pendidikan

Pencapaian pendidikan penduduk yang berada di Kecamatan Gampong Lampulo. Kuta Alam yang terletak di Kota Banda Aceh mempunyai perbedaan yang cukup signifikan antara masa sebelum atau tanpa masa sekolah dengan masa kuliah.

Statistik Tingkat Pencapaian Pendidikan di Kecamatan Gampong Lampulo. Tabel di bawah ini menampilkan lokasi Kuta Alam di Banda Aceh.

Table 4.3
jenjang Pendidikan Gampong Lampulo

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/belum bersekolah	521
2	Belum tamat SD/ sederajat	277
3	Tamat SD/ Sederajat	296
4	SLTP/ Sederajat	1100
5	SLTA/ Sederajat	2162
6	Diploma I/II	369
7	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda	273
8	Diploma IV/ Strata I	275
9	Strata II	91
10	Strata III	78
	Jumlah	5443

Sumber : Data Laporan Gampong Lampulo Kec, Kuta Alam Kota Banda Aceh

4) Berdasarkan Mata Pencarian

Table 4.4
Berdasarkan pekerjaan

Mata Pencarian	Jumlah
Nelayan	333
Petani	5
Pertukangan	224
Karyawan Swasta dan Pedagang	1591
Pensiun TNI/POLRI	16
Pensiun PNS	176
Tni/Polri	100
Pekerja Lainnya	2014
Jumlah	4459

Sumber : Data Laporan Gampong Lampulo Kec, Kuta Alam Kota Banda Aceh

Gampong lampulo merupakan desa dengan mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan dan karyawan swasta/pedagang. Berdasarkan catatan, terdapat 1.924 warga yang berprofesi sebagai nelayan, pekerja swasta, atau pedagang. Kelompok ini terdiri dari 333 orang nelayan dan 1.591 orang pegawai swasta dan pedagang. Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 4.459 orang. Oleh karena itu, penduduk Gampong Lampulo memperoleh banyak keuntungan dengan melakukan perdagangan dan perikanan.

5) Sarana Pendidikan dan Fasilitas Bermain

Berdasarkan data observasi lapangan dan wawancara dengan aparat desa Gampong Lampulo, terlihat bahwa fasilitas pendidikan di Gampong Lampulo kurang

memadai. Masih kurangnya fasilitas pendidikan serta sumber daya untuk membina perkembangan moral anak. Prasarana yang tersedia terbatas pada kegiatan pengajian anak sore hari di TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) dan pengajian malam hari di rumah-rumah warga.⁵⁰ Lihat tabel di bawah ini untuk informasi lebih lanjut:

Table 4.5
Sarana dan prasarana Pendidikan

No	sarana dan prasarana	jumlah
1	Lengkap dan cukup-PAUD	1 unit
2	Lengkap dan cukup-TK	1 unit
3	Lengkap dan masih kurang-TPA	1 unit
4	Ada tempat pengajian/masjid balai	1 unit
Jumlah		4 unit

Berdasarkan grafik yang tersedia, terlihat bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Gampong Lampulo masih kurang memadai. Sarana dan prasarana pendidikan yang ada hanya empat yang belum lengkap.

6) Data Kemiskinan Penduduk Desa

Table 4.6

Jumlah penduduk miskin

Distribusi Bantuan	Kepala Keluarga
BLT DD	150
PKH	71

⁵⁰ Data Profil Gampong Lampulo Kec, Kuta Alam Kota Banda Aceh 2021

BPNT	153
BBM	133
Jumlah	507

Distribusi bantuan untuk mengatasi kemiskinan di Gampong Lampulo dilakukan dengan baik dan teliti koordinasi dengan setiap kepala Lorong dan perangkat gampong supaya pendataan tepat sasaran. Dana Desa (BLTDD) memberikan bantuan langsung tunai kepada 150 keluarga setiap bulannya. Kementerian Sosial memberikan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) kepada total 71 keluarga terpilih dari rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah. Informasi ini diperoleh langsung dari pusat. Kemensos memberikan bantuan BPNT kepada 153 KK yang mendapatkan bahan pokok seperti beras, minyak, gula, daging, telur, dan lainnya. Bantuan ini diberikan langsung oleh pusat. Pemerintah memberikan bantuan bensin kepada total 133 keluarga.

4.1.3 Visi Dan Misi Gampong Lampulo

RPJM Gampong Lampulo memuat visi dan misi keuchik terpilih yang dikomunikasikan selama proses pemilihan keuchik. Pernyataan visi dan misi tersebut menguraikan rencana perkembangan dan keadaan Gampong di masa depan, yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 tahun masa jabatan, dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dan potensi Gampong Lampulo. Visi dan misinya adalah sebagai berikut:

A. Visi

Visi adalah gambaran yang meyakinkan mengenai kondisi masa depan yang diinginkan, berdasarkan penilaian terhadap potensi dan kebutuhan Gampong. Perumusan visi Gampong Lampulo dilakukan melalui metodologi partisipatif, dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan di Gampong Lampulo, antara lain Pemerintah Gampong, TPG, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Kemasyarakatan Gampong, dan Masyarakat Gampong yang lebih luas. Memperhatikan faktor eksternal yang ada di gampong, seperti satuan kerja wilayah pengembangan di kecamatan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, maka Visi Gampong Lampulo adalah sebagai berikut:

“ Mengembangkan individu dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta memupuk nilai-nilai IMTAQ (Iman dan Taqwa) yang kuat, serta mengedepankan kemandirian dan amanah Sumber Daya Manusia”.

B. Misi

Selain perumusan Visi, juga dilakukan penetapan misi. Misi-misi tersebut berisi pernyataan-pernyataan yang harus dijalankan oleh gampong untuk mewujudkan visi gampong. Pertanyaan#Visi kemudian diubah menjadi sebuah misi agar menjadi praktis dan dapat ditindaklanjuti. Misi Gampong Lampulo dirumuskan melalui pendekatan kolaboratif dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Lampulo Gampong. Proses ini selaras dengan perumusan Visi dan Misi:

1. Menegakkan Syariat Islam secara komprehensif di segala bidang kehidupan untuk meningkatkan kualitas IMTAQ.
2. Meningkatkan aksesibilitas warga

3. Menawarkan fasilitas dan struktur fisik yang mendukung upaya industri dan meningkatkan efisiensi.
4. Memfasilitasi usaha ekonomi dan kecerdikan individu dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi lokal.
5. Meningkatkan kompetensi aparaturnya dengan memperkuat kinerja, disiplin, pelayanan, struktur administrasi, akuntabilitas, dan transparansi.
6. Meningkatkan keterlibatan generasi muda dan perempuan dalam kemajuan daerah pedesaan
7. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam struktur pemerintahan terpusat Republik Indonesia

4.2 Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan di Gampong Lampulo

Pendekatan pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan dituangkan dalam pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menekankan tugas negara untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dan memajukan kesejahteraan warga negaranya, dengan tujuan akhir untuk mencapai keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, dalam peraturan pemerintah disebutkan bahwa upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan sosial dilakukan melalui pemberian bantuan sosial yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PKM) nomor 181 tahun 2012, mengacu pada alokasi dana, barang, atau jasa oleh pemerintah pusat atau

daerah untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko sosial dan meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁵¹

Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu mencapai tingkat kondisi kehidupan minimum yang diperlukan untuk mencapai kualitas hidup yang layak. Kemiskinan merupakan indikator penting untuk menilai status kesejahteraan suatu rumah tangga. Tingkat kemiskinan suatu wilayah dijadikan indikator agregat untuk menilai tingkat kesejahteraan wilayah tersebut.⁵² Kemiskinan ditandai dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Permasalahan rendahnya standar hidup ini tidak terlepas dari pendapatan yang tidak mencukupi, perumahan di bawah standar, layanan kesehatan dan kesehatan yang tidak memadai, serta terbatasnya pendidikan masyarakat, sehingga menyebabkan kelangkaan sumber daya manusia dan meningkatnya angka pengangguran.⁵³

Program kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan untuk memfasilitasi pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, bagian penting dalam pengentasan kemiskinan ditentukan oleh beberapa program yang operasionalnya ditanggung oleh APBD. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan sumber daya keuangan masyarakat, sekaligus melibatkan mereka dalam proses perancangan program untuk memberdayakan mereka. Program yang diusulkan pemerintah gampong Lampulo adalah skema pemberian pinjaman modal kepada Usaha Mikro Kecil (UMK).

⁵¹ Peraturan Menteri Keuangan (PKM) Nomor 181 Tahun 2012

⁵² Ayu Oktaviani Musri, 2020. Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan, hlm 4.

⁵³ *Ibid*, hlm 4.

Pemerintah Lampulo kini memberlakukan program pinjaman modal usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). BUMG merupakan suatu badan usaha yang kepemilikan utamanya atau seluruhnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung, dengan memanfaatkan aset lokal yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa, dan usaha lainnya secara efektif demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁵⁴

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah inisiatif di seluruh dunia yang dirancang untuk meningkatkan standar keberadaan manusia dengan mengatasi faktor sosial dan ekonomi, serta mempertimbangkan konsekuensi lingkungan. Meskipun program ini ditujukan untuk penggunaan global, implementasinya di tingkat regional dan nasional juga harus memperkuat prinsip-prinsip dan nilai-nilai SDGs yang inklusif dan partisipatif yang tertanam dalam program ini. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah untuk menghapuskan segala bentuk kemiskinan, khususnya di Lampulo, yang menghadapi tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan.

Dapat disimpulkan bahwa program BUMG dan program SDGs merupakan dua program yang berbeda. Sumber dana sdgs adalah dari pemerintah sedangkan program BUMG dari beberapa sumber seperti: Dana Desa, Pinjaman Modal Usaha dan hibah dari pihak ketiga. hal lain yang membedakan kedua program tersebut adalah cara alokasi dana yang berdampak pada hasil yang didapatkan. Program

54

BUMG mengalokasikan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal usaha sehingga lahir perputaran ekonomi dan berdampak pada turunnya angka kemiskinan, sedangkan alokasi dana dari program SDGs hanya berbentuk bantuan keuangan tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan lainnya. sebagai bantuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Menyusul pembentukan program pembiayaan modal usaha, pemerintah Lampulo Gampong secara aktif menyelenggarakan inisiatif sosialisasi dan lokakarya, baik secara internal maupun eksternal, untuk memastikan pelaksanaan program ini secara efektif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program peminjaman modal usaha bagi pelaku UMKM oleh pemerintah Gampong Lampulo ini tujuannya senada dengan program SDGs yang dicanangkan pemerintah yaitu menekan angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang dilakukan Pemerintah Lampulo Gampong dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Lampulo Gampong Kota Banda Aceh. Penelitian ini mengacu pada teori manajemen strategis David, yang secara khusus berfokus pada perumusan strategi, implementasi strategi, dan indikator evaluasi strategi.

Penelitian yang dilakukan di Desa Lampulo didasarkan pada tiga parameter pengelolaan strategis tersebut. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai temuan penelitian yang diperoleh melalui metode pengumpulan data yang telah ditentukan, beserta hasil penelitian terkait.

4.2.1 Perumusan Strategi

Perumusan strategi melibatkan identifikasi program atau rencana yang dilaksanakan oleh organisasi, tujuan akhir yang ingin dicapai, dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang pemimpin untuk melibatkan masyarakat desa dalam proses pengambilan kebijakan untuk mengembangkan strategi optimal yang selaras dengan tujuan yang diinginkan dari suatu lembaga atau organisasi.

Proses penetapan rencana akan meningkatkan kapasitas organisasi untuk menghadapi beragam permasalahan. Perumusan strategi berupaya menetapkan serangkaian tindakan untuk secara efektif mencapai target dan sasaran yang diinginkan. Pemerintah Gampong Lampulo menerapkan beberapa strategi dalam mengatasi kemiskinan.

Strategi yang di gunakan pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan yaitu:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Cukup jelas tercatat dalam bab 1 (pasal 10 perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.⁵⁵ Seperti adanya Bantuan Sosial (Bansos) dalam bentuk bantuan tunai maupun bantuan material.

⁵⁵ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial, 182.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sekarang sudah berjalan dengan cukup baik. Dalam penerimaan PKH ada 4 jenis yang berhak menerima bagi anggota keluarga miskin yaitu: ibu hamil, memiliki anak sekolah, memiliki balita, dan memiliki anggota keluarga yang sakit. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bukan hanya rumah tangga miskin yang berhak menerima bantuan PKH tetapi fakir juga tergolong rumah tangga yang berhak menerima bantuan PKH dikarenakan mereka masih kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, pakaian, kesehatan, dan tempat berlindung. Sedangkan fakir adalah orang sudah bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya, tetapi karena keterbatasan keterampilan sehingga hasil usahanya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok.⁵⁶ Hal tersebut di perkuat dalam wawancara dengan bapak Bapak Alta Zaini mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

“Kami pihak pemerintah desa sebelum menyalurkan bantuan PKH melakukan survei lapangan terlebih dahulu untuk mendata mana masyarakat yang berhak menerima bantuan dan yang tidak berhak menerima bantuan. Yang termasuk penerima bantuan PKH bukan hanya rumah tangga miskin tetapi juga yang tergolong kedalam rumah tangga fakir. Agar kebutuhan dasar masyarakat miskin di lampulo terpenuhi.”⁵⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pemerintah lampulo tidak hanya memberikan bantuan kepada masyarakat miskin tetapi juga memberikan

⁵⁶ Ardianto Bhinadi, Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Yogyakarta), (Cet, 1: Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2017), 9

⁵⁷ Wawancara dengan bapak alta zaini sebagai kepala desa lampulo mengenai program PKH, pada hari dan tanggal : Senin 02 Oktober 2023

kepada masyarakat fakir. Proses pemberian bantuan langsung di damping oleh perangkat desa agar pemberian bantuan PKH bisa berjalan dengan optimal.

Pendampingan yang di lakukan pemerintahan desa merupakan salah satu upaya untuk agar program PKH bisa terlaksana dengan baik. Pendampingan memiliki tugas yang sangat penting dalam pelaksana PKH yang paling dekat dengan masyarakat. Setiap satu atau dua bulan sebelum penerimaan PKH perangkat desa melakukan musyawarah dengan masyarakat penerima bantuan di kantor desa Lampulo. Musyarawah dilakukan untuk mengevaluasi mengenai perkembangan masyarakat setelah menerima bantuan, untuk mengontrol mereka agar bantuan benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya.

2. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program BLT-DD merupakan program Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari pendapatan Asli Desa atau bisa disebut dengan nama “Dana Desa”. Munculnya program tersebut akibat adanya bencana yang diluar kendali manusia yaitu covid-19 pada tanggal 2 maret 2020.⁵⁸ BLT-Desa prioritas utama penggunaan dana desa pada tahun ini adalah program perlindungan sosial berupa BLT-Desa. Bantuan Langsung Tunai Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang kemudian sumber dari dana desa. Pemberian ini bertujuan untuk membantu warga miskin desa, sehingga menjadi tambahan pendapatan untuk meningkatkan daya beli warga miskin dalam memenuhi kebutuhan setiap harinya.

⁵⁸ Abd. Fatta, Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), (Studi Di Kelurahan Pagerharjo, Kapanewo Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo). Tahun 2023, Hal 68.

BLT menjadi salah satu instrument yang tidak kalah penting dalam penanganan atau pemberantasan kemiskinan, sebab dalam implementasinya BLT dianggap secara cepat dalam penerapannya. Dan juga tidak kalah penting adalah proses pembagiannya yang langsung di berikan kemasyarakat miskin yang sebelumnya sudah di data oleh tim pendata yang di bentuk oleh pemerintah desa lampulo. Sehingga kemudian apa yang menjadi kekurangan dalam penerapannya dapat langsung diketahui oleh pihak pemerintah setempat.

Adapun alokasi dana desa di Gampong Lampulo di tahun 2022 sebanyak 25% di gunakan untuk BLT, program BLT dibagi mulai januari sampai selesai dan setiap Kepala Keluarga/KK mendapatkan 300.000 yang di bagikan secara tunai atau dikirim ke rekening penerima.⁵⁹ Penerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di gampong Lampulo sebanyak 150KK dari jumlah keseluruhan kepala keluarga yaitu 1359KK. Berdasarkan hasil pengumpulan data dari peneliti bahwa penerima BLT tersebut adalah hasil dari seleksi dari tim pendataan yang di bentuk oleh pemerintah desa Lampulo. Prioritas pembagian BLT adalah masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan lainnya sesuai dengan syarat yang telah di tentukan oleh pemerintah.

3. Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang di gunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *E-Warong* yang

⁵⁹ Wawancara dengan ibu syarifah selaku kasi informasi, pada hari dan tanggal : Senin 02 Oktober 2023

bekerja sama dengan bank penyalur.⁶⁰ Program Bantuan Non Tunai (BPNT) di gampong lampulo berlangsung sejak tahun 2020. penyaluran beras dan telur bagi sekelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi kemiskinan beban pengeluaran masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan, memberi gizi, yang lebih seimbang kepada masyarakat dan juga mendorong pencapaian tujuan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dan mendorong pelaku usaha UMKM setempat.

Jumlah penerima BPNT di Gampong Lampulo sebanyak 153KK berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa penerima program BPNT di Gampong lampulo masih cukup banyak dan kemiskinan di Gampong Lampulo juga masih banyak, sedangkan salah satu tujuan dari program SDGs Desa adalah menghilangkan kemiskinan dari tingkat desa. Program penanggulangan kemiskinan adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan atau menjadikan keluarga miskin berada pada taraf kesejahteraan sehingga dapat memiliki kehidupan yang layak.

4. Peminjaman modal usaha bagi pelaku UMKM melalui BUMG

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Alta Zaini yang menjabat sebagai Kepala Desa di kantor desa Lampulo, taktik pemberian pembiayaan usaha kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

“Sebagai aparat pemerintah desa, kami telah menerapkan strategi pengentasan kemiskinan di Gampong Lampulo melalui program pemberian pinjaman modal usaha kepada UMKM. Program ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan di desa. Program ini juga kami sertakan bersama dengan program SDGs, dalam rencana kerja pemerintah desa yang disebut

⁶⁰ Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum...*, H. 5.

*RKPD*es. Namun perlu dicatat bahwa program SDGs yang memberikan bantuan dalam bentuk PKH, BLT, BPNT, dan bentuk bantuan lainnya tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Setelah merumuskan strategi, selanjutnya pemerintah melakukan pembentukan tim yang terdiri dari aparatur desa, kepala dusun dan beberapa Masyarakat untuk pendataan kepada Masyarakat penerima bantuan agar tepat sasaran. Pemerintah desa dan BUMG juga melakukan musyawarah perencanaan agar program peminjaman modal tersebut bisa menjadi program penggerak perekonomian dan tidak bergantung pada program SDGs saja. Pemerintah desa juga memberi pelatihan agar Masyarakat lebih paham dalam mengelola usahanya.”⁶¹

Berdasarkan wawancara dengan Kepala desa, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Lampulo merumuskan strateginya dengan menggabungkan seluruh program ke dalam RKP. Selain itu, pemerintah Lampulo melakukan pengumpulan data secara menyeluruh untuk memastikan bahwa penerima bantuan diidentifikasi secara akurat. Untuk memperoleh informasi tambahan, berikut tim penyusunan RKP Desa pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Tim penyusunan RKP Desa

No	Jabatan	Tugas
1.	Kepala Desa	Pembina
2.	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Desa • Kepala Lorong • Pengurus BUMG 	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>

⁶¹ Wawancara dengan bapak alta zaini selaku kepala desa, pada hari dan tanggal : Senin 02 Oktober 2023

	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat 	Anggota
--	--	---------

Mengenai pemberian modal usaha melalui BUMG, Pemerintah gampong lampulo melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) memberi bantuan usaha melalui pendaftaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha pendaftaran kepada pemerintah untuk mendapatkan bantuan dalam mengembangkan usahanya. Meski demikian, prosedur operasional usaha kecil harus sempurna agar konsistensinya tetap terjaga. Tantangan utama yang sering dihadapi oleh pengusaha kecil adalah pendanaan yang tidak memadai, yang seringkali berujung pada kebangkrutan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan akan pinjaman pengganti yang mudah diakses oleh masyarakat luas guna mempertahankan dan memajukan organisasi.

Informasi berikut diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Alta Zaini, Kepala Desa di kantor desa Lampulo, mengenai pemberian pinjaman modal usaha yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan:

“Kami dari pemerintah desa saat ini sedang melakukan alternatif untuk mengurangi angka kemiskinan, yaitu dengan memberi pinjaman modal usaha kepada masyarakat agar masyarakat bisa menjalankan usahanya masing-masing, sebelumnya ada juga program SDGs tetapi program tersebut hanya berfokus pada bantuan seperti BLT, PKH, dan dalam bentuk bantuan lainnya. Namun setelah adanya program peminjaman modal usaha dari BUMG ini lebih membantu masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomiannya. Kami telah membuat mekanisme pendaftaran program peminjaman modal ini dapat diakses oleh publik untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang

proses pendaftaran. Kami mengantisipasi bahwa program ini akan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian lokal.”⁶²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembiayaan modal usaha bagi masyarakat akan menjadi inisiatif yang bermanfaat bagi pemerintah desa. Program ini berpotensi meringankan kemiskinan dan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat setempat.

Peneliti juga mewawancarai bapak Jalaluddin MPd selaku pengurus BUMG sebagai berikut:

“Hadirnya program peminjaman modal ini tentunya sangat mendukung bagi Masyarakat yang mempunyai usaha namun tidak bisa berkembang dikarenakan terhalang sama modal. Program ini menjadikan masyarakat dapat memperoleh pinjaman dari pihak manajemen. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat sebelum mengajukan pinjaman modal di kantor BUMG. Persyaratan tersebut antara lain menyediakan dokumen identitas asli seperti KTP, KK, dan dokumen identitas penanggung jawab. Jika terjadi permasalahan mengenai pembayaran kembali modal oleh masyarakat, kami akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memulihkannya, memastikan bahwa masyarakat mematuhi ketentuan pembayaran kembali yang telah disepakati. Dengan adanya program peminjaman modal usaha ini tentunya bisa membantu masyarakat gampong Lampulo yang kesulitan dalam permodalan.”⁶³

Berdasarkan pengamatan empiris peneliti, program pinjaman modal usaha kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ditawarkan Pemerintah Lampulo diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Program tersebut di desain untuk Masyarakat yang ingin memulai bisnis

⁶² Wawancara dengan bapak alta zaini selaku kepala desa, pada hari dan tanggal : Senin 02 Oktober 2023

⁶³ Wawancara dengan bapak Jalaluddin MPd selaku ketua BUMG, pada hari dan tanggal : Senin 02 Oktober 2023

namun terhalang oleh biaya, maka pemerintah lampulo mengeluarkan kebijakan peminjaman modal usaha kepada Masyarakat melalui BUMG. Tujuan utama dari program ini, sebagai organisasi keuangan, adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat umum yang menghadapi masalah terkait permodalan. Program pinjaman modal yang ditawarkan BUMG dirancang khusus bagi pengusaha mikro pemula dengan menggunakan metode berbasis kelompok. Program ini berfungsi sebagai alternatif bagi mereka yang menghadapi tantangan dalam mengelola usaha mikro, sekaligus mendorong pertumbuhan dan kemajuan usaha mereka. Program pinjaman modal usaha masyarakat yang ditawarkan BUMG merupakan inisiatif pemerintah Lampulo yang dirancang untuk mendorong dan menumbuhkan kemandirian masyarakat. Dalam perbincangan dengan Bapak Bahrul Ikhsan, S.Kep yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Lampulo, disampaikan bahwa:

“ Kepala desa telah menguraikan strategi untuk memerangi kemiskinan, yang mencakup berbagai solusi, salah satunya adalah memberi pinjaman modal usaha melalui BUMG. Pengawasan terhadap pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan merupakan bagian integral dari kegiatan ini, sehingga menjamin pengendalian yang efektif terhadap pelaksanaan program. Pemerintah telah memulai kegiatan pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk meningkatkan sektor perekonomian dengan memaksimalkan program pinjaman modal usaha bagi pelaku UMKM. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat Lampulo.”⁶⁴

Salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan melakukan pengawasan pemerintah desa terhadap program pinjaman modal usaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta optimalisasi peran perangkat

⁶⁴ Wawancara dengan bapak bahrul ikhsan selaku sekdes, pada hari dan tanggal : Senin 02 Oktober 2023

desa dalam perencanaan partisipatif. Hal ini mencakup memastikan bahwa pemerintah terlibat secara aktif dan efisien dalam seluruh tahapan kegiatan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

4.2.2 Implementasi Strategi

Setelah strategi dasar dan tujuan jangka panjang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengeksekusi strategi tersebut melalui tindakan nyata. Hal ini disebabkan karena manajemen strategis merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berkesinambungan. Prosesnya dimulai dengan perumusan rencana, dilanjutkan dengan pelaksanaannya, dan diakhiri dengan penilaian efektivitasnya.⁶⁵

Menerapkan strategi pada dasarnya berarti mengimplementasi strategi setelah menyusunnya menjadi berbagai alokasi sumberdaya yang optimal. Untuk menjalankan strategi yang telah disusun, suatu organisasi harus melalui proses implementasi. Selain itu, pemimpin proses manajemen strategis harus memiliki kemampuan untuk mengawasi proses secara tekun dan konsisten untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Implementasi Program SDGs Desa, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Desa No. 13 Tahun 2020 oleh Kementerian Desa, menjadi landasan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di desa. Program SDGs Desa mendapat prioritas sebagai program Pembangunan Berkelanjutan yang mendapat bantuan dana

⁶⁵ Musfira Basri 2022, Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Di Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Skripsi, Hlm 80.

desa. Analisis Iskandar tahun 2021 menemukan bahwa SDGs Desa berkontribusi terhadap tingkat keadilan sebesar 74% dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.⁶⁶ Gampong Lampulo menjalankan Program SDGs Desa dengan memanfaatkan potensi desanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Reza Septinaldi yang menjabat sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Lampulo, diperoleh informasi mengenai program SDGs sebagai berikut:

“Terkait program SDGs, kami sebagai pemerintah desa telah melaksanakannya secara ketat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh menteri desa.” Rencana pengentasan kemiskinan sejalan dengan tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dengan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan menjamin akses mereka terhadap layanan penting di daerah pedesaan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah desa dengan cara mendukung pelaku UMKM dengan memberikan mereka pinjaman modal usaha melalui BUMG. Program-program tersebut diharapkan nantinya akan menjadi indikator untuk menurunkan angka kemiskinan gampong lampulo.”⁶⁷

Pemerintah desa di Lampulo sangat menganjurkan peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Pemerintah desa melakukan beragam inisiatif untuk mengurangi angka kemiskinan. Hal ini terlihat dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, khususnya melalui pemberian pinjaman keuangan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini juga terkait erat dengan upaya individu yang tekun untuk mengangkat dirinya dari kemiskinan.

Selain itu, Bapak Alta Zaini memberikan beberapa komentar mengenai program SDGs:

⁶⁶ *Ibid.*, 61.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Reza Septinaldi Urusan Umum dan Perencanaan, pada hari dan tanggal : Senin 02 Oktober 2023

“Selain pendekatan-pendekatan lain, pemerintah desa juga menerapkan banyak teknik untuk memerangi kemiskinan, termasuk pengelolaan dana desa yang efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana desa yang kami lakukan selalu melibatkan masyarakat agar lebih transparan atau terbuka. Kemudian dalam perumusan strategi pemerintah melakukan pembentukan Tim pendataan agar bantuan yang di salurkan oleh pemerintah tepat sasaran, tujuan pembentukan tim ini supaya proses pendataan lebih mudah dan juga memantau proses pelaksanaan program SDGs.”⁶⁸

Kalimat di atas mengisyaratkan agar pemerintah desa menggunakan cara-cara yang efektif dan tepat dalam mengelola dana daerah dan juga bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan untuk meningkatkan transparansi. Pemerintah desa juga membentuk tim pendataan untuk memfasilitasi pendataan di tingkat daerah. Proses perumusan strategi di Lampulo dilakukan melalui perundingan tingkat desa untuk memastikan optimalisasi strategi yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan ini mencakup pengurangan kemiskinan di semua dimensi, yang bertujuan untuk menyelesaikan setidaknya setengah dari individu yang terkena dampak kemiskinan sebagaimana ditentukan oleh kriteria nasional. Dari paparan di atas ibu syarifah selaku kasi pelayanan informasi juga memberi pendapat terkait program SDGs untuk mengatasi kemiskinan dalam bentuk memberi bantuan pokok kepada masyarakat miskin antara lain sebagai berikut:

“Program SDGs ini hanya di berikan kepada masyarakat miskin yang sudah di data oleh tim pendataan, bantuan tersebut dalam bentuk bantuan seperti yang di katakan tadi yaitu dalam bentuk BLT, PKH, BPNT dan bantuan

⁶⁸ Wawancara dengan bapak alta zaini selaku kepala desa, pada hari dan tanggal : Senin 02 Oktober 2023

lainnya, bantuan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, kami dari pemerintah desa sudah menjalankan sesuai yang di perintahkan oleh pemerintah pusat dimana Dana Desa harus di gunakan sebagian untuk program SDGs.”⁶⁹

Berdasarkan temuan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Lampulo, melalui program SDGs, menawarkan bantuan kepada masyarakat miskin dengan memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan melaksanakan program-program yang dirancang oleh pemerintah desa, maka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dapat dipercepat. Hal ini membantu pemerintah desa mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai tantangan yang mereka hadapi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan di Gampong Lampulo.

Namun program SDGs sendiri tidak cukup dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Lampulo, oleh karena itu pemerintah lampulo melalui BUMG melakukan kerjasama yaitu memberikan modal usaha kepada masyarakat lampulo yang mempunyai usaha. Program ini di harapkan bisa menjadi solusi yang baik untuk pertumbuhan ekonomi di lampulo.

Usaha mikro mengacu pada kegiatan ekonomi skala kecil yang biasanya bersifat informal dan tidak terdaftar, tidak memiliki pengakuan hukum atau struktur organisasi formal. Modal usaha mikro mengacu pada kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau organisasi sesuai dengan prinsip ekonomi mikro. Usaha kecil adalah usaha komersial yang menekankan pada perolehan pendapatan

⁶⁹ Wawancara dengan ibu syarifah selaku kasi informasi, pada hari dan tanggal : Senin 02 Oktober 2023

dan dioperasikan oleh sejumlah individu dengan anggaran kurang dari Rp 10.000.000,- dan mempekerjakan tidak lebih dari lima orang.⁷⁰

Jika terjadi masalah operasional, usaha kecil mungkin mengalami inkonsistensi. Tantangan utama yang sering dihadapi oleh pemilik usaha kecil adalah pendanaan yang tidak memadai, yang seringkali menyebabkan penutupan usaha atau kebangkrutan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan akan pinjaman pengganti yang mudah diakses oleh masyarakat umum untuk memfasilitasi fungsi dan pertumbuhan organisasi.

Prosedur selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan sering mengadakan pertemuan antar pemangku kepentingan terkait dan mengawasi serta menilai hasil bantuan yang diberikan oleh pejabat setempat. Pemantauan dilakukan sebagai sarana penelusuran dan evaluasi kegiatan pembiayaan modal usaha di lapangan. Tujuan dari tindakan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa modal yang diberikan BUMG tidak disalah gunakan untuk pengeluaran pribadi, melainkan digunakan untuk perolehan sumber daya usaha yang diperlukan.

Berikut hasil wawancara dengan ibu intan selaku peminjam modal pada BUMG, yaitu:

“Pinjaman modal usaha yang saya peroleh dari BUMG sangat membantu keuangan keluarga saya, karena saya sebelumnya menjalankan usaha kecil-kecilan penjual jajanan gorengan dengan dana terbatas di pinggir jalan, setelah saya mengetahui bahwa ada program peminjaman modal usaha dari BUMG yang sebelumnya sudah di sosialisasikan oleh pemerintah lampulo,

⁷⁰ Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kotemporer* (Jakarta: Modern English, Edisi 3, 2002), Hlm 1.620

sekarang saya sudah membuka usaha baru yaitu membuka kedai klontong kecil dan dengan ilmu yang saya dapat dari pelatihan yang di lakukan oleh pemerintah desa sangat membantu dalam mengembangkan usaha saya saat ini."⁷¹

Berdasarkan temuan wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keuntungan finansial yang ditawarkan BUMG sangat bermanfaat bagi pertumbuhan usaha di Komunitas Lampulo. Modal tersebut sebagian besar digunakan untuk tujuan bisnis, meliputi pendirian dan perluasan perusahaan.

Analisis komprehensif yang dilakukan selama penelitian lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di Gampong Lampulo telah menggunakan dana bantuan BUMG secara efektif, sehingga menghasilkan peningkatan ekonomi yang signifikan. Pada awalnya, individu hanya bergantung pada pendapatan yang diterimanya berupa gaji atau penghasilan dari pekerjaan sebelumnya. Kini, melalui usaha komersial mereka, mereka telah mencapai kemampuan untuk menghidupi keluarga mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Untuk mengetahui keberhasilan program ini, peneliti mewawancarai Bapak Reza Septinaldi:

“ Program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BBM, dan bentuk bantuan tidak langsung lainnya. Selain itu, kami menerapkan upaya pengentasan kemiskinan yang dikenal dengan BUMG. Peran pemerintah desa disini memastikan penyalurannya tepat sasaran. Oleh karena itu kita mengerahkan tim yang sudah di bentuk oleh pemerintah desa untuk membantu proses sosialisasi pendataan, sampai kepada pendampingan agar semua Masyarakat yang benar-benar

⁷¹ Wawancara dengan yurizal, pada hari dan tanggal : Rabu 04 Oktober 2023

membutuhkan dapat menerima bantuan dari program SDGs dan juga modal usaha dari BUMG.”⁷²

Wawancara dengan Bapak Iskandar yang pernah mendapatkan bantuan terkait Sustainable Development Goals (SDGs) difokuskan pada hasil wawancara beliau yang antara lain:

“Tentu kita mendukung pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui pemberian bantuan. Walaupun tidak seberapa tapi minimal bisa membantu untuk mengurangi kebutuhan hidup. Mekanisme penarikan juga berbeda-beda tergantung Masyarakat terdaftar pada program apa, dan sebelumnya pemerintah juga sudah mensosialisasikan kepada Masyarakat, dan bantuan yang diberikan ada dalam bentuk kelompok ada juga perKK. Mengenai program SDGs, saya belum begitu paham. Namun saya tau program yang di berikan oleh pemerintah seperti PKH, BPNT, BLT, dan inisiatif bantuan serupa lainnya. Tetapi pemerintah gampong lampulo sempat melakukan sosialisasi dan pendataan tahun lalu, dan saya juga mendapatkan bantuan melalui pendataan tersebut, tetapi saya kurang paham dengan program tersebut.”⁷³

Temuan wawancara menunjukkan bahwa pemerintah dalam mengatasi permasalahan masyarakat dengan memberi bantuan atau dukungan bisnis kepada masyarakat dapat secara efektif memitigasi masalah sosial. Setiap program yang dikeluarkan pemerintah mempunyai mekanisme penyalurannya yang berbeda-beda. Dan masyarakat kurang memahami mengenai program SDGs. Melalui sosialisasi, masyarakat memperoleh kesadaran akan ketersediaan bantuan keuangan atau sumber daya penting, yang menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap program SDGs di desa. Sosialisasi mengenai program SDGs dan tujuannya masih belum menjangkau masyarakat luas, meskipun pemerintah sudah berupaya melakukan sosialisasi. Namun

⁷² Wawancara dengan bapak Reza Septinaldi selaku selaku kepala urusan umum dan perencanaan, pada hari dan tanggal : Senin 02 Oktober 2023

⁷³ Wawancara dengan bapak Iskandar, pada hari dan tanggal : Rabu 04 Oktober 2023

karena terbatasnya kehadiran pada acara sosialisasi, pemahaman masyarakat terhadap program tersebut masih terbatas.

4.2.3 Evaluasi strategi

Evaluasi strategi adalah proses pemantauan hasil desain dan implementasi strategi, yang melibatkan pengukuran kinerja organisasi dan penerapan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Mekanisme dan metrik umpan balik yang efisien memainkan peran penting dalam mengevaluasi strategi. Pengukuran kinerja adalah fase penting yang melibatkan pemantauan dan evaluasi secara ketat hasil atau pencapaian upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan utama tugas.

Evaluasi berfungsi sebagai sarana menilai kemajuan pengembangan program untuk mengidentifikasi perubahan atau tindakan yang diperlukan jika terjadi kesalahan, dan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Evaluasi rencana sangat penting untuk menilai kelayakan pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh rencana. Saat pertama kali dilaksanakan di Gampong Lampulo program peminjaman modal usaha di terima dengan baik oleh Masyarakat pemerintah Lampulo menghimbau untuk tidak hanya membuka usaha UMKM, akan tetapi pengembangan usaha lain seperti membuat tambak ikan, menanam sayuran hidroponik dan bentuk usaha lainnya.

Berdasarkan teori strategi pemerintah yang dikemukakan oleh David, bahwa evaluasi merupakan salah satu poin penting dalam perumusan strategi pemerintah. Peneliti melihat pemerintah gampong Lampulo melakukan evaluasi dengan

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Alta Zaini, kepala desa, berfokus pada penilaian inisiatif yang bertujuan mengatasi kemiskinan:

Pertama, evaluasi yang dilakukan pemerintah lampulo yaitu mengevaluasi semua program yang tertuang dalam RKPDes. Selain itu, terdapat evaluasi terhadap strategi penyusunan APBDes, yang mengharuskan kepala desa melakukan revisi yang diperlukan terhadap rancangan tersebut dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dalam waktu 10 hari kerja setelah menerima evaluasi. Selain itu, evaluasi terhadap keterlibatan masyarakat juga penting, khususnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan desa. Agar penggunaan dan pengelolanya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih selaras dengan kepentingan masyarakat.⁷⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Bahrul Ikhsan, S.Kel yang menjabat sebagai sekretaris desa mengenai penilaian rencana pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

Rancangan program yang telah di rancang dan disusun selanjutnya akan di evaluasi oleh tim dari desa yang terdiri dari kepala desa, sekdes, kesra, kasi pemerintahan, kasi pelayanan, kepala lorong, dan tokoh-tokoh masyarakat. Evaluasi ini sekaligus sebagai wujud pendampingan desa dalam penyusunan program-program untuk mengatasi kemiskinan, semua sudah berjalan dengan lancar tidak ada banyak catatan evaluasi, dimana program dari pemerintahan desa sendiri untuk mewujudkan perencanaan tahunan desa, untuk mempercepat pencapaian dari SDGs maka di perlunya fokus dalam perencanaan yang matang untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini.⁷⁵

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Reza Septinaldi yang menjabat sebagai kepala urusan umum dan perencanaan berfokus pada evaluasi pengumpulan data dalam implementasi program SDGs:

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Alta Zaini selaku kepala desa, pada hari dan tanggal : Senin 02 Oktober 2023

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Bahrul Ikhsan selaku sekdes, pada hari dan tanggal : Senin 02 Oktober 2023

Strategi pertama yang dilakukan dengan membentuk tim pendataan yang terdiri dari perangkat desa, pengurus BUMG, dan tokoh masyarakat desa terpilih. Proses pendataan berlangsung selama 7 hari dan dilakukan di tingkat desa dengan jumlah penduduk 5.443 jiwa dan 1.359 KK. Tujuan dari upaya pendataan ini adalah untuk memastikan tepat sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat di masa depan. Tim pendataan akan melakukan pendataan terkait kondisi ekonomi masyarakat lampulo sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah sasaran ataupun perencanaan yang tidak sesuai, dengan adanya pendataan proses memberi bantuan akan berjalan sesuai dengan keinginan dan tidak lagi mendapat bantuan double. Kedua, melakukan musdes hasil pendataan siapa saja yang berhak menerima bantuan dari program SDGs ini dilakukan pada bulan Mei, yang di hadiri oleh perangkat desa, tim pendata, dan tokoh masyarakat

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi atau hasil dari pelaksanaan program BUMG dan SDGs sudah berjalan dengan cukup baik pemerintah desa juga memberikan pelayanan yang terbaik. Secara keseluruhan mengenai strategi pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan terhadap Program *Sustainable Development Goals* Di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sejalan dengan teori strategi David. Teori ini mengemukakan bahwa strategi dapat diukur melalui tiga indikator: perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Dapat disimpulkan bahwa hasilnya baik. Hal ini dikuatkan dengan menurunnya angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 mencapai 12% sebelum turun menjadi 8% pada tahun 2022,⁷⁶ yang menunjukkan kemandirian teknik yang digunakan. Namun demikian, terdapat berbagai tantangan yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu kendalanya adalah terbatasnya sosialisasi pemerintah mengenai program SDGs desa. Akibatnya,

⁷⁶ Wawancara dengan ibu syarifah selaku kasi informasi, pada hari dan tanggal : Senin 02 Oktober 2023

sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui sifat dan tujuan program SDGs, dan pengetahuan mereka terbatas pada program bantuan yang sudah dikenal seperti BLT, PKH, BPNT, dan bantuan lainnya. Masyarakat awam masih kurang memahami program SDGs karena upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa belum menjangkau mereka.

Implementasi program Sustainable Development Goals (SDGs) di Gampong Lampulo telah dilaksanakan sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Desa tentang pelaksanaan Program SDGs. Meskipun keberlanjutan program SDGs masih direncanakan, implementasi SDGs sudah patut diapresiasi karena tim perangkat desa telah mengumpulkan data secara efektif, namun ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui dengan program SDGs. Program SDGs di Gampong Lampulo sudah memberi dampak yang cukup baik dalam hal memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin di Lampulo dengan cara memberi bantuan berupa BLT, PKH, BPNT, BBM, dan bantuan lainnya.

Sedangkan dampak dari program peminjaman modal usaha oleh pemerintah desa melalui BUMG sangat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Program peminjaman modal usaha ini sangat efektif dikarenakan sangat membantu para masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam meningkatkan perekonomian keluarganya. Dampak dari program ini terjadinya perputaran ekonomi di tengah masyarakat sehingga masyarakat bisa meningkatkan pendapatannya. Namun masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan dana pinjaman untuk usahanya sehingga mereka kesulitan pada saat pengembalian dana pinjaman tepat waktu.

4.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Melalui Program SDGs

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung atau menghambat strategi pemerintah desa dalam mengentaskan kemiskinan di Gampong Lampulo Kota Banda Aceh, maka dapat dikaji unsur-unsur apa saja yang mendorong dan memotivasi strategi pemerintah desa dalam memerangi kemiskinan. Sebaliknya, faktor penghambatnya terlihat dari berbagai kendala yang dihadapi selama implementasi strategi pemerintah desa yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan.

4.3.1 Faktor Pendukung Pemerintah Gampong Lampulo

Keberhasilan suatu program pemerintah, khususnya program peminjaman modal usaha untuk UMKM kecil di tentukan seberapa baik suatu kebijakan dapat di terima oleh Masyarakat luas. Keberhasilan pencapaian ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah dan dukungan masyarakat secara keseluruhan terhadap inisiatif ini. Komponen pendukung adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan atau program pemerintah.

Keberhasilan implementasi program pinjaman modal usaha bagi UMKM sangat bergantung pada penggabungan unsur-unsur pelengkap dalam rancangannya. Sumber daya pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program pembiayaan modal usaha pada UMKM di desa Lampulo meliputi ketersediaan sumber daya manusia dan aksesibilitas sarana dan prasarana. Sebelum program ini diluncurkan, masyarakat Lampulo telah mengikuti lokakarya pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Reza Septinaldi selaku kasi pemerintahan mengenai faktor pendukung mengatasi kemiskinan:

“faktor pendukung yaitu semua masyarakat mendukung dengan adanya program peminjaman modal usaha bagi pelaku UMKM dan kita juga berharap dengan strategi yang sudah pemerintah jalankan ini bisa di implementasikan dengan baik, kemudian faktor pendukung selanjutnya dengan ada rancangan RKPDes semua program bisa di jalankan dengan teratur sesuai yang sudah di musyawarahkan oleh pihak perangkat desa dan masyarakat.”⁷⁷

Lebih lanjut wawancara dengan ibu Fauziah Basyariah selaku pemilik usaha ikan keumamah:

Sebenarnya dengan adanya program peminjaman modal usaha bagi pelaku UMKM ini. Sangat membantu kami para pelaku usaha, pemerintah juga memberi dukungan penuh untuk kami sehingga kami para pelaku UMKM jadi semangat untuk menjalankan usaha masing-masing. Di tambah pemerintah juga memberi fasilitas seperti membuat pelatihan untuk meningkatkan skill dan cara mengelola usaha masing-masing. Pemerintah juga mengevaluasi setiap bulannya melalui grup whatsapp, biasanya setiap ada event produk-produk unggulan dari masyarakat akan di pamerkan di stand gampong untuk promosi.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa dukungan masyarakat sangatlah penting. Tanpa keterlibatan masyarakat, pemerintah desa tidak akan mampu mengidentifikasi atau mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat. Program

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Reza Septinaldi selaku kepala urusan umum dan perencanaan, pada hari dan tanggal : Senin 02 Oktober 2023

⁷⁸ Wawancara dengan ibu Fauziah Basyariah pemilik usaha ikan keumamah, pada tanggal 04 Oktober 2023

peminjaman modal usaha sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM yang terhalang dengan modal, strategi yang dilakukan pemerintah lampulo sudah sangat baik dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di lampulo.

4.3.2 Faktor Penghambat Pemerintah Gampong Lampulo

Dalam proses perubahan, berbagai faktor penghambat dapat muncul dan juga faktor pendukung. Faktor-faktor penghambat ini menghambat atau bahkan menghambat kemajuan, yang bermanifestasi sebagai hambatan yang memperlambat atau mencegah tercapainya hasil yang diinginkan. Strategi pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan di Gampong Lampulo.

Terkait dengan pelaksanaan program peminjaman modal usaha di masyarakat, terdapat beberapa kendala, seperti ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah yang sering mencari arahan. Selain itu, pemerintah dihadapkan pada tantangan tidak terbayarnya kembali pinjaman usaha oleh sejumlah besar peminjam, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan program peminjaman modal usaha UMKM harus di hentikan sementara, karena pinjaman tidak mengembalikan pinjamannya.

Berikut hasil wawancara dengan ibu syarifah selaku kasi informasi :

“Adapun hambatan yang di hadapi oleh pemerintah yaitu karakter masyarakat yang susah untuk di arahkan padahal pihak pemerintah sudah membuat pelatihan pemberdayaan kepada masyarakat supaya Masyarakat bisa mengelola dengan baik usahanya dan sebelum pemerintah memberikan modal usaha kepada Masyarakat pemerintah

*sudah menyampaikan beberapa syarat yang harus Masyarakat siapkan dan pemerintah juga menyampaikan untuk membayar pinjaman setiap bulan sesuai yang sudah di sepakati oleh peminjam. Namun ada beberapa hambatan yang di alami, Masyarakat yang sudah meminjam modal usaha sering kali tidak menyetor Kembali atau tidak membayar pinjaman tersebut sehingga program tersebut harus dihentikan sementara waktu karena kekurangan modal. Padahal program ini memberi dampak yang sangat bagus untuk pertumbuhan ekonomi di Masyarakat lampulo.*⁷⁹

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah terhambat oleh permasalahan tidak terbayarnya kembali pinjaman yang dilakukan oleh banyak peminjam modal usaha. Akibatnya, pemerintah menghadapi kekurangan uang tunai untuk membantu UMKM lain yang ingin meminjam modal usaha.

Memberikan pinjaman keuangan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang perdagangan yang berlokasi di Lampulo. Mayoritas pemilik UMKM memiliki modal berkisar Rp. 1 juta hingga 10 juta, tergantung besar kecilnya perusahaan mereka. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk menyediakan uang tunai yang cukup untuk perluasan dan pengadaan sumber daya yang diperlukan untuk bisnis Anda yang sudah ada. Pemanfaatan pinjaman modal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada sektor perdagangan di Lampulo. Mayoritas pemilik UMKM melaporkan menggunakan dananya untuk memperoleh produk perdagangan,

⁷⁹ Wawancara dengan ibu syarifah selaku kasi informasi, pada hari dan tanggal : Senin 02 Oktober 2023

seperti pembelian alat dan bahan untuk usahanya serta menutupi biaya sewa tempat usaha.

Jika dicermati jangka waktu pinjaman modal yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor perdagangan di Lampulo, terlihat sebagian besar pemilik UMKM memilih jangka waktu pinjaman 12 bulan. Keputusan ini dipengaruhi oleh jumlah pinjaman yang relatif kecil sehingga membuat pemilik usaha memilih jangka waktu pengembalian yang lebih singkat. Selain itu, mayoritas pemilik UMKM menyatakan angsuran bulannya berkisar antara 100 ribu hingga 500 ribu, sesuai dengan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pelunasan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang disajikan pada bab sebelumnya, peneliti merumuskan kesimpulan mengenai pendekatan pemerintah desa dalam melaksanakan program BUMG dan Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program-program ini menjadi kerangka untuk merancang program pengentasan kemiskinan di Gampong Lampulo yang saat ini berjalan efektif. Berikut ulasannya:

1. Implementasi program SDGs dalam pengentasan kemiskinan di Gampong Lampulo menghadapi beberapa kendala seperti yang telah disebutkan di atas. Terkait program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), telah dilaksanakan secara efektif berdasarkan strategi yang telah dirumuskan pemerintah, dan proses evaluasi telah dilakukan secara efisien. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaan program ini. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman di antara banyak masyarakat mengenai program SDGs. Masyarakat lebih mengenal program bantuan seperti BLT, PKH, BPNT, dan lain-lain, dibandingkan program SDGs. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah Lampulo untuk melibatkan masyarakat Lampulo belum sepenuhnya membuahkan hasil yang diharapkan.

2. Strategi yang dilakukan pemerintah lampulo dalam meningkatkan pendapatan masyarakat adalah Peminjaman Modal Usaha melalui BUMG. Strategi yang dilakukan oleh pemerintahan lampulo ini cukup bagus untuk mengurangi angka kemiskinan. Program peminjaman modal usaha sangat efektif karena sangat membantu masyarakat khususnya para pelaku UMKM dalam meningkatkan perekonomian. Dampak dari program tersebut terjadinya perputaran ekonomi di tengah masyarakat. Namun terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, terdapat masyarakat yang tidak menggunakan dana pinjaman dengan baik sehingga kesulitan pada saat pengembaliannya.

5.2 Saran

Temuan penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penelitian ini. Rekomendasinya adalah sebagai berikut:

1. UIN Ar-raniry Banda Aceh diharapkan dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai kontribusi ilmiah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai SDGs Desa yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber daya yang berharga, khususnya bagi mahasiswa yang terdaftar pada program studi Ilmu Politik.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan, rekomendasi, dan penilaian yang berharga kepada pemerintah desa, khususnya di Gampong Lampulo. Masukan-masukan ini akan membantu dalam merancang program-

program masa depan yang dapat meningkatkan perekonomian lokal dan secara efektif mengatasi masalah kemiskinan.



DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Dodi Kurtubi. 2018. *“Sustanaible Goals (SDGs) dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial”*

<https://www.riau.go.id/home/skpd/1970/01/01/3740-sustainabledevelopment-goals-sdgs-dan-pembangunan-kesejahteraan-sosial-olehdodi>, diakses pada 20 Desember 2022 pukul 17.40.

Alfajri, dkk, *Pelatihan dan Pemberdayaan Tunas Sustainable Development Goals (SDGs) Siswa Tingkat SMA/MA Sederajat Di Kota Pekanbaru Untuk Mewujudkan Tujuan Sustainable Cities And Communities Dan Responsible Consumption And Production*, (Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin, Vol.4, No. 2, 2020), 127.

AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik “Konsep, Teori, dan Aplikasi,5th* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 2

Armida Salsiah Alisjahbana, dkk, *Menyongsong SDGS Kesiapan Daerah-Daerah Di Indonesia....*, 3

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021. <https://aceh.bps.go.id/> . di akses pada tanggal 7 january 2022

David, F. R. 2017. *Manajemen Strategi Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Jakarta: Selemba Empat

Elvira Handayani Jacobus, Paulus Kindangen, Een N. Walewangko, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara*, (Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol.19, No.7, 2018), 5.

Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. 2016. *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*. Universitas Padjajaran.

Islam Faruk Zaini. 2021. *Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa*. Universitas Hasanuddin Makasar.

Junaidin Zakaria, "Pengantar Teori Ekonomi Makro", (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 95-96

J. Sulusu. *Pengambilan keputusan stratejik untuk organisasi public dan organisasi nonprofil*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996) hlm. 89

Kementrian Desa, PDT Dan Transmigrasi. 2022. "*Sistem Informasi Desa*". <https://kemendes.go.id/> di akses pada tanggal 7 January 2022

Muhammad Fardan Ngoyo. 2015. *Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Prof. H. Mahmud yunus, *kamus arab Indonesia*, (Jakarta; Yayasan penyelenggara, penerjemah atau penafsiran al-qur'an, 1993), hlm.76

Panuluh, S., dan Fitri, M. R. (2016). *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indoneisa.*

Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara* (Batu Bara: Jurnal Geografi, Vol 9, No.1,2017), Hal.58-5

Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 175

Sudjana. 2004. *Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat dan Teori Pendukung serta Asas*. Bandung: Falah Production

Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif*. Yogyakarta: ArRuzz Media.



LAMPIRAN



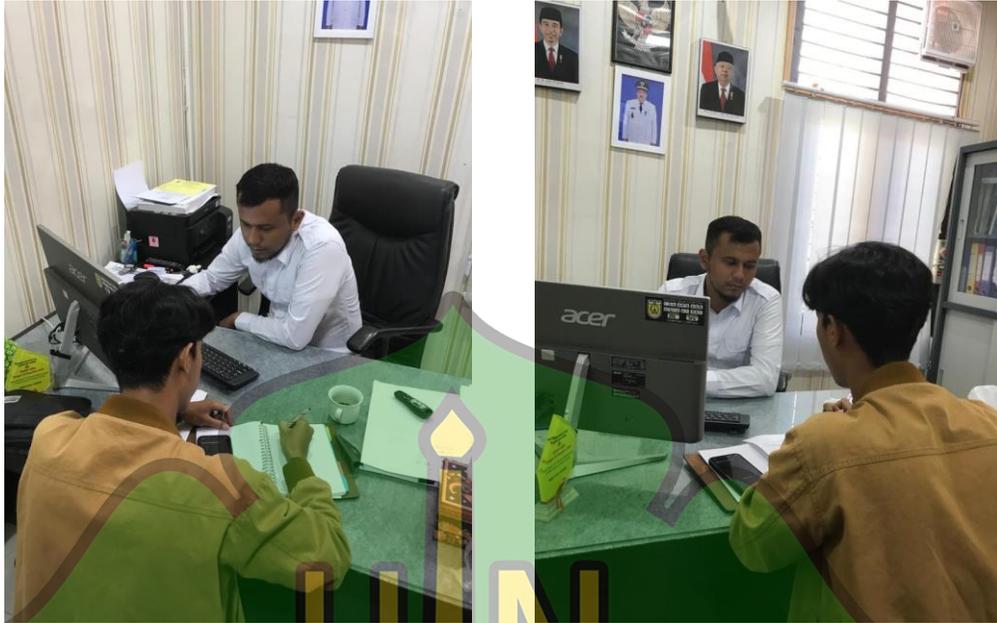
Gambar 2

Wawancara dengan kepala desa dan kepala lorong



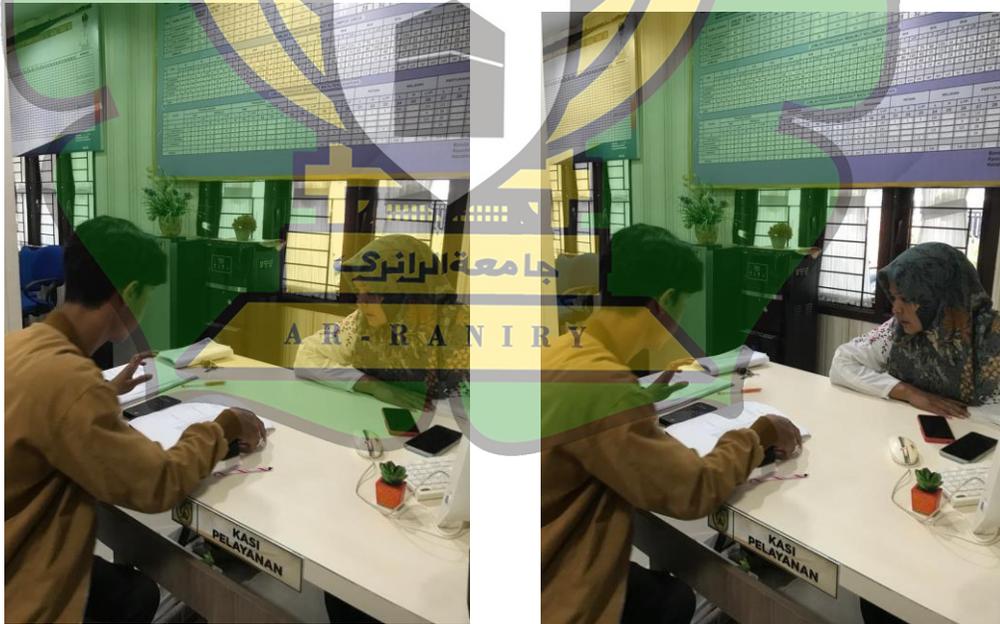
Gambar 3

Wawancara dengan kepala urusan umum dan perencanaan



Gambar 4

Wawancara dengan sekretaris desa



Gambar 5

Wawancara dengan kasi pelayanan dan informasi



Gambar 6
Wawancara dengan kasi keuangan



Gambar 7
Wawancara dengan masyarakat dan pelaku UMKM

LAMPIRAN

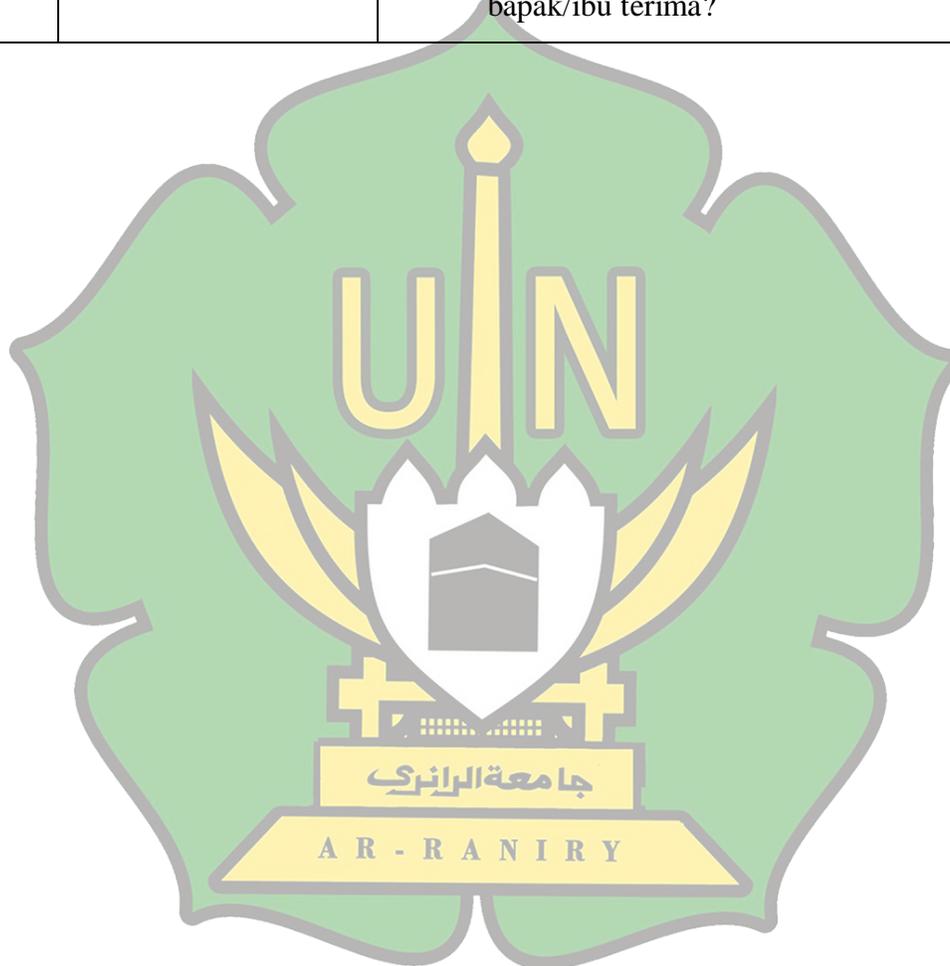
PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA MENDALAM

NO	FOKUS MASALAH	PERNYATAAN
1.	Perumusan strategi	<ol style="list-style-type: none">1. bagaimana strategi pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan di lampulo?2. bagaimana perumusan strategi dalam mewujudkan SDGs dengan tujuan mengurangi kemiskinan?3. bagaimana strategi pemerintah desa dalam mengurangi kemiskinan melalui peminjaman modal usaha dari BUMG?4. apakah dalam penerapan strategi mendapat hambatan?
2.	Implementasi strategi	<ol style="list-style-type: none">1. bagaimana implementasi strategi pemerintah gampong lampulo dalam mengatasi kemiskinan?2. bagaimana proses pelaksanaan pendataan SDGs dalam merangkum semua data-data masyarakat miskin?3. apa saja hambatan dalam pelaksanaan pendataan SDGs?4. Bagaimana implementasi pemiminjamn modal usaha dari BUMG apakah sudah berjalan

		<p>dengan baik atau belum?</p> <p>5. Bagaimana proses pendampingan yang di lakukan pemerintah lampulo dalam penerapan program BUMG?</p> <p>6. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan BUMG?</p>
3.	Evaluasi strategi	<p>1. Bagaimana hasil evaluasi strategi mengatasi kemiskinan di gampong lampulo?</p> <p>2. Bagaimana hasil akhir dari proses pendataan program SDGs dan BUMG?</p> <p>3. Berapa rentan waktu yang di lakukan pemerintah Lampulo dalam mengevaluasi program tersebut?</p>
Pertanyaan Tambahan		
		<p>1. Apakah program peminjaman modal usaha sudah berjalan dengan baik?</p> <p>2. Menurut bapak ibu apakah pinjaman yang di berikan oleh BUMG sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM</p> <p>3. Apakah pemerintah lampulo melakukan pendampingan atau pelatihan kepada pelaku UMKM?</p> <p>4. Apa saja syarat dalam peminjaman modal usaha di BUMG?</p> <p>5. Bagaimana pendapat bapak/ibu</p>

		<p>mengenai pelaksanaan program SDGs dan BUMG?</p> <p>6. Apakah bapak/ibu tau dengan program SDGs?</p> <p>7. Selain bantuan dari BLT, PKH, BPNT apakah ada program lain yang bapak/ibu terima?</p>
--	--	--



**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH GAMPONG LAMPULO
KECAMATAN KUTA ALAM
KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
PENDAPATAN				
pendapatan Asli Desa		0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.004.594.590,00	1.925.043.231	79.551.359,00
Dana Desa		1.144.619.000,00	1.144.619.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak		44.696.648,00	0,00	44.696.648,00
Alokasi Dana Gampong		780.424.231	780.424.231	0,00
Dana Retribusi Daerah		34.854.711,00	0,00	34.854.711,00
Pendapatan Lain-lain		38.672.750,00	40.586.846,12	1.914.096,12
JUMLAH PENDAPATAN		2.043.267.340,00	1.965.630.077,12	77.637.262,88
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN GAMPONG		792.870.629,14	659.377.488,00	133.493.141,14
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG		437.621.020,00	412.775.701,00	24.845.319,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG		205.918.650,00	190.949.650,00	14.969.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG		261.432.300,00	227.387.000,00	34.045.300,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA. DARURAT DAN MENDESAK		564.566.049,50	562.342.500,00	2.223.549,50
JUMLAH BELANJA		2.262.408.648,64	2.052.832.339,00	209.576.309,64
SURPLUS 1 (DEFISIT)		(219.141.308,64)	(87.202.261,88)	(131.939.046,76)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		219.141.308,64	219.141.308,14	0,50
PEMBIAYAAN NETTC		219.141.308,64	219.141.308,14	0,50
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	131.939.046,26	(131.939.046,26)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Gampong Lampulo, 08 December 2023

Alta Zaini

Kode Instansi 0000009 GAMPONG LAMPULO
 Kode Bendahara 000000901 GAMPONG LAMPULO
 Jumlah Anggota 77
 Jml Memiliki Rekening 77
 Jml Tanpa Rekening 0
 Jumlah Penghasilan 23,100,000 00
 Jumlah Potongan 0 00
 Periode 2/11/2023

No	NIP	No Rekening	NAMA	GAJI
1	00000001	0190220001262	ZHRUL MAHDAR	300,000
2	00000002	01002240011636	UMMITA KHAIRANI	300,000
3	00000003	01002240011625	FITRI HANDAYANI	300,000
4	00000004	01902240007789	DEDE MUCHTAR	300,000
5	00000005	01202207780056	FARIATI	300,000
6	00000006	61002430006654	FAISAL AFWADI	300,000
7	00000007	61502200014231	SYUKRIAH	300,000
8	00000008	01902240001303	IRMAWATI	300,000
9	00000009	50002200006006	MUBARAK KAMAL	300,000
10	00000010	01902200008601	MUTIA FAHRINA	300,000
11	00000011	01002210009776	AGUSSANI	300,000
12	00000012	01002240011426	RUMIATI	300,000
13	00000013	01902240007426	SOFYAN	300,000
14	00000014	01902240007544	YUSNIDAR	300,000
15	00000015	50002200005995	BUDIYANTO ALI	300,000
16	00000016	61402200109994	RAJA AIDIL FITRAH	300,000
17	00000017	01902240007511	YUNIAR	300,000
18	00000018	01902240007581	NUR AKLIMA	300,000
19	00000019	01902240007614	AINOL MARDHIAH	300,000
20	00000020	01902240011265	SURYATI	300,000
21	00000021	01902240007415	SYUKRINI	300,000
22	00000022	01902240007430	NURBAYANI	300,000
23	00000023	50002036012076	IFWADI	300,000
24	00000024	01002240147694	KARMILAWATI	300,000
25	00000025	01902240007673	JUARNITA	300,000
26	00000026	01902410061252	HERDIANSYAH	300,000
27	00000027	01902240011512	M THALIB	300,000
28	00000028	01902240011394	SALMAH	300,000
29	00000029	61502200014194	NURMALA	300,000
30	00000030	01902068203364	AFRIZAL	300,000
31	00000031	01002206722667	SYAMSUDDIN	300,000
32	00000032	01002200058031	ANWAR	300,000
33	00000033	61502200014124	ARMAYANI	300,000
34	00000034	01902240008023	NURHAYATI	300,000
35	00000035	01902240011442	M NASRULLAH	300,000
36	00000036	0190224000463	RAHMANILA	300,000
37	00000037	01902240015071	NUR AFNI	300,000
38	00000038	61202200199666	KHAIRUL TARMIZI	300,000
39	00000039	01902200030010	SYAMSINAR	300,000
40	00000040	01902410053382	TAZNAWIR	300,000
41	00000041	01902200007013	NURJANNAH	300,000
42	00000042	01002200053761	MARDHIAH	300,000
43	00000043	01902240011453	IDAWATI	300,000
44	00000044	61402200117495	FADLY SYAHPUTRA	300,000
45	00000045	61402240010123	DARMAYANTI	300,000
46	00000046	01002240150240	ZULYAZAINI	300,000
47	00000047	01902240015045	MARIANA	300,000
48	00000048	01902240002493	AMINAH	300,000
49	00000049	01002240003310	DIDI JUNAIDI	300,000
50	00000050	01002240003343	SUMARDI	300,000

51	00000051	01902240002655	ABDUL WAHID	300,000
52	00000052	01902240002622	MURHABAN	300,000
53	00000053	01902240003672	SUHERMAN	300,000
54	00000054	61402240002434	MAULIDA SAPUTRI	300,000
55	00000055	01902240007695	ZAINAL ABIDIN	300,000
56	00000056	01902240007592	NURHAYATI	300,000
57	00000057	01902240007861	ROSITA	300,000
58	00000058	01902240007931	ADNEN	300,000
59	00000059	01002240011743	MARIANA M SALEH	300,000
60	00000060	01902240008130	BUNDIAH	300,000
61	00000061	01902240007684	YUSNIDAR	300,000
62	00000062	01902240007570	SAUDAH AHMAD	300,000
63	00000063	01902240007791	ZAINIAH	300,000
64	00000064	01902240007894	JALALUDDIN	300,000
65	00000065	01902240011604	MAHLIATI	300,000
66	00000066	01002200052943	MARIANA YUSUF	300,000
67	00000067	01902240011582	YUDIANSYAH	300,000
68	00000068	01902240009606	MAHDALENA	300,000
69	00000069	01902240000522	M ICHSAN	300,000
70	00000070	01902240011291	MUSNIATI	300,000
71	00000071	01902200002290	ROSNAWATI	300,000
72	00000072	01902200001251	NURLAILI	300,000
73	00000073	01902240010215	ZULFINAH	300,000
74	00000074	01902200028282	ASWANI	300,000
75	00000075	61502240014561	NURSIHAH	300,000
76	00000076	01902200024955	SAFARINA	300,000
77	00000077	01002200147815	YULISNAWATI	300,000



Gambar 8

Nama penerima BLT Gampong Lampulo

No	Nama Penerima	Kelurahan	Alamat
1	Abawohyi	Lampulo	II Indra Budiman No 1 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
2	Adrida Wati	Lampulo	II Indra Budiman Dusun Tpk Disayang Lorong II Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
3	Agus Darmawan	Lampulo	II Duhla No. 08 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
4	Agnadi	Lampulo	II B Delma Dsn Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
5	Akhlamah	Lampulo	II Kenari Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
6	Alamyah	Lampulo	II Louser Dusun Jurong Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
7	Alfa Rahmati	Lampulo	II Kemanga II No 15 Dusun T Teungoh Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
8	Almoharamah	Lampulo	II Anggrek I Dsn T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
9	Ariana	Lampulo	II Louser Jurong Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
10	Arnetti	Lampulo	II Cempaka No. 2 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
11	Ash Habul Yamin	Lampulo	II Tanjung Jurong Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
12	Astmi	Lampulo	II Indra Budiman Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
13	Aomiyati	Lampulo	II S M Raja Dsn T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
14	Achya Rahmah	Lampulo	II Tpk Delang No 5 Dsn Malahayati Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
15	Budaton Hafid	Lampulo	II Binari Dusun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
16	Bahraisi	Lampulo	II Beringin II Dsn T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
17	Bayariyah	Lampulo	II Jempua I Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
18	Boedy Satria	Lampulo	II Indra Budiman Dusun Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
19	Chaitra Husna	Lampulo	II Malahayati I, Seroja I Dusun Malahayati Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
20	Charuddin M Nur Usman	Lampulo	II Anggrek I Dsn T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
21	Ch Nasy	Lampulo	II S M Raja Malahayati Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
22	Cut Nurmalia	Lampulo	II Buah Delima Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
23	Cut Yanti Mala	Lampulo	II Duhla Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
24	Dahlia	Lampulo	II Buah Delima Dusun Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
25	Dahliyah	Lampulo	II Beringin Dsn T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
26	Dahriyah	Lampulo	II Kenari Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
27	Dailami	Lampulo	II Kenari I Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
28	Darmawati	Lampulo	II T Teungoh Dusun Malahayati Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
29	Darminati	Lampulo	II Louser II Dusun Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
30	Darminah	Lampulo	II Kenanga Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
31	Darmawati	Lampulo	II Beringin Aca I Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
32	Darwana	Lampulo	II Buah Delima Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
33	Desi Yeni A	Lampulo	II Keladi Dusun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
34	Desvi Juliana	Lampulo	II Jempua I No. 16 Dusun T Teungoh Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
35	Diana	Lampulo	II Kemboja Dsn T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
36	Dia	Lampulo	II Indra Budiman Jurong Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
37	Eka Sunanti	Lampulo	II Louser Dsn Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
38	Eli Sahara	Lampulo	II Seroja Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
39	Eliza Antoni	Lampulo	II Tanjung Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
40	Ernanati	Lampulo	II Kenari Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
41	Ersi	Lampulo	II Indra Budiman Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
42	Ernita Rasali	Lampulo	II Indra Budiman Dsn T Disayang No 18 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
43	Fadi	Lampulo	II Anggrek II Dusun T Teungoh Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
44	Fajriadi	Lampulo	II Kenari Dsn T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
45	Fayyq Chum	Lampulo	II Kasuari Dusun Malahayati Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
46	Ferdin	Lampulo	II Buah Delima Dusun Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
47	Fernida Lita	Lampulo	Lampulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
48	Fatimah	Lampulo	II Indra Budiman Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
49	Fatimah	Lampulo	II Feladi Dsn T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
50	Fatimah	Lampulo	II Kemboja Dsn T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
51	Fera	Lampulo	II Duhla Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
52	Ferry Iq Sowardana	Lampulo	II Seroja Jaa B Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
53	Fitriah	Lampulo	II Indrabudiman Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
54	Fitriani	Lampulo	II Anggrek Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
55	Hafid Nasution	Lampulo	II Kasuari Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
56	Hafimah	Lampulo	II Beringin I Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
57	Hafizatan Sa'diyah	Lampulo	II Louser Dsn Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
58	Hansidah	Lampulo	II Buah Delima Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
59	Hasan Basri	Lampulo	II Seroja No.9a Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
60	Helmizar	Lampulo	II Kemboja No 33 Dsn T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
61	Husnul Uzza	Lampulo	II Teratai Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
62	Husni Hajar	Lampulo	II Louser Dusun Jurong Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
63	Istiwati	Lampulo	II Beringin II Lr I Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
64	Itan Mayasari	Lampulo	II Indra Budiman Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
65	Irina Yanti	Lampulo	II S M Raja Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
66	Irwansyah	Lampulo	II Indra Budiman Dsn Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
67	Jahna	Lampulo	II Jempua Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
68	Jahna Salfiri	Lampulo	II Indra Budiman Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
69	Jariah	Lampulo	II Louser I Dsn Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
70	Kamariah	Lampulo	II Kemboja Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
71	Kartini	Lampulo	II Anggrek Dusun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
72	Kasrawati	Lampulo	II Indra Budiman Dsn Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
73	Khasani	Lampulo	II Beringin Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
74	Khaulah	Lampulo	II Indra Budiman I, Budiman II Dusun Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
75	Lutfah Hanoum	Lampulo	II Beringin II Lr I Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
76	Lia Arza	Lampulo	II Feladi Dsn T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
77	Linda Wati	Lampulo	II Anggrek I Dsn Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
78	M Nur Abdullah	Lampulo	II Cempaka I Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
79	M Rahmat Nazarullah	Lampulo	II Indra Budiman Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
80	Mardiah	Lampulo	II Buah Delima Dusun Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
81	Mardiyah	Lampulo	II Kemboja Dsn T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh

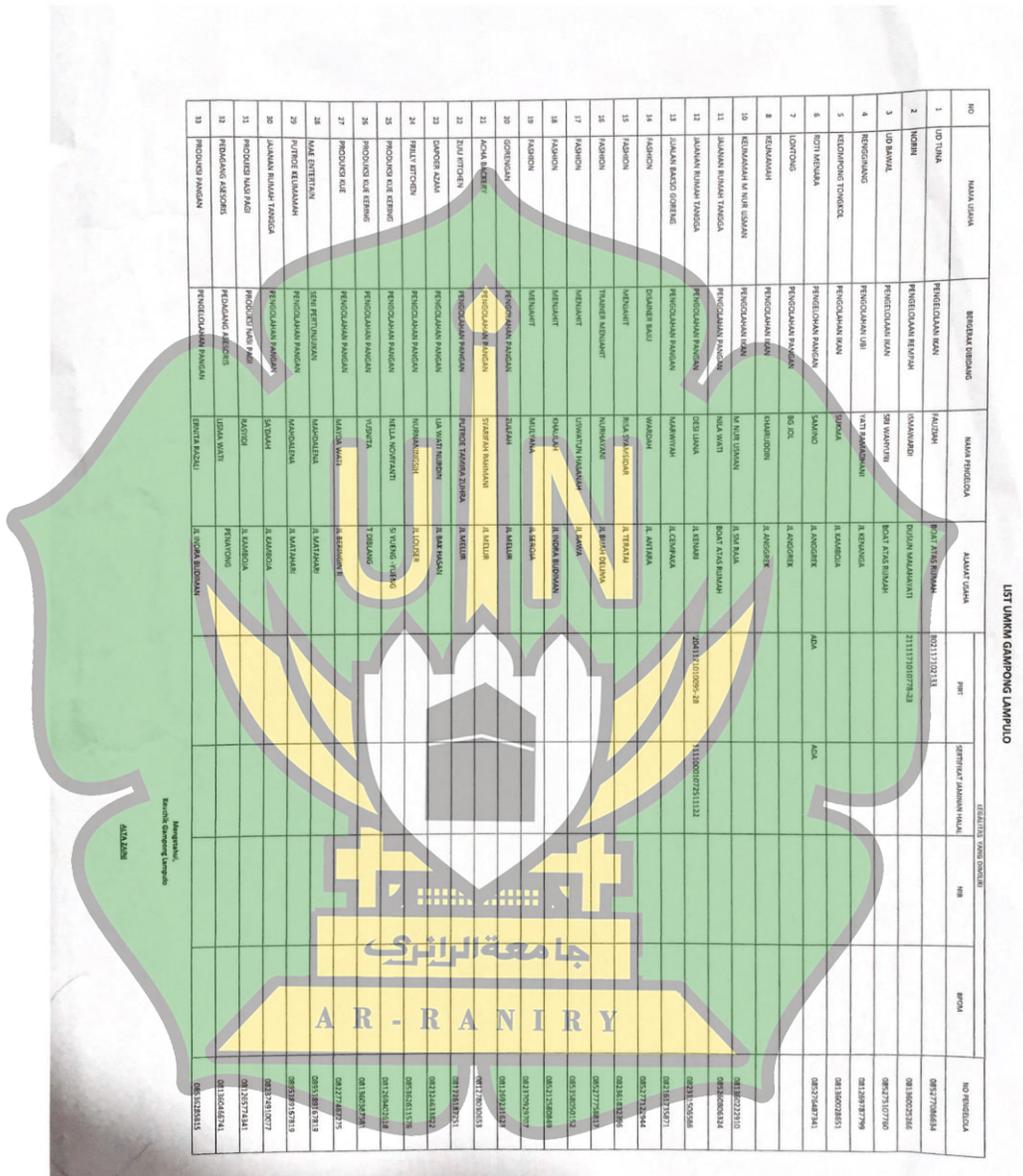
82	Martama	Lampulo	II S M Raja Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
83	Mariana	Lampulo	II Beringin II Dun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
84	Mariano	Lampulo	II Buah Delima Dsn Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
85	Martalin	Lampulo	II Dahlia Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
86	Martina	Lampulo	II Indra Budiman Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
87	Martina	Lampulo	II Indra Budiman Dsn Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
88	Martina	Lampulo	II Dahlia No 8 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
89	Marwiyah	Lampulo	II Cempaka No 2 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
90	Masyitah Nur Aulia	Lampulo	II Indra Budiman Jurong Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
91	Masyah Sari	Lampulo	II Indra Budiman Dun Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
92	Muchlis	Lampulo	II Indra Budiman Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
93	Muhammad Danil	Lampulo	II Kenari Dun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
94	Muhammad Rajuni	Lampulo	II Indra Budiman Dusun III Tpk Di Sayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
95	Muhammad Sarong	Lampulo	II Indra Budiman Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
96	Muhammad Shadri	Lampulo	II Kamboja No. 27 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
97	Muhsi	Lampulo	II Indra Budiman Dsn Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
98	Muliana	Lampulo	II Anggrek II Dusun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
99	Muliati	Lampulo	II Indra Budiman Dun Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
100	Mulyana	Lampulo	II Buah Delima Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
101	Mulyana	Lampulo	II Seroja No 3 A Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
102	Mulyana	Lampulo	II Indra Budiman Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
103	Murnati	Lampulo	II Dahlia Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
104	Muslina	Lampulo	II Sim Raja Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
105	Muti	Lampulo	II Anggrek II Dusun T Teungoh Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
106	Muti	Lampulo	II Kenari Dun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
107	Muti	Lampulo	II Seroja No 11 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
108	Najriyah	Lampulo	II Kamboja Dun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
109	Nawiyah	Lampulo	II Kenari I Dusun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
110	Nazariah	Lampulo	II Anggrek I Dsn T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
111	Nelati	Lampulo	II Alarsia Dun T T Teungoh Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
112	Nilawati	Lampulo	II Kenari I Dusun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
113	Nisa Triani	Lampulo	II Seroja Dun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
114	Nira Agustina	Lampulo	II B Delima Dsn Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
115	Novaldi	Lampulo	II Melur Dun T Teungoh Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
116	Nur Jariah	Lampulo	II Keladi Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
117	Nur Salma	Lampulo	II Teratai Dusun Jurong T S Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
118	Nuzani	Lampulo	II Beringin I Dun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
119	Nuzani	Lampulo	II Kenari I Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
120	Nuzriah	Lampulo	II Indra Budiman Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
121	Nuzriati Raden	Lampulo	II Beringin Dun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
122	Nurbaya	Lampulo	II Seroja No 13 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
123	Nurhalimah	Lampulo	II Kamboja No 31 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
124	Nurhayati	Lampulo	II Indra Budiman Loroeng III Dusun Tpk Di Sayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
125	Nurismi	Lampulo	II Tanjung Dusun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
126	Nurjanah	Lampulo	II Jempua I Dun Teungoh Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
127	NurLada	Lampulo	II B Delima Dusun Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
128	NurLida Ali	Lampulo	II Mawar No 32 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
129	NurLilawati	Lampulo	II Kenari I Dun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
130	Nurliela	Lampulo	II Kamboja Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
131	Nurliani	Lampulo	II Jempua I Dusun T Teungoh Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
132	Nurliza Wati	Lampulo	II Buah Delima Dun Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
133	Nurma	Lampulo	II Sim Raja Dun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
134	Nurrahli	Lampulo	II Seroja No 05 A Dusun Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
135	Nurmayyiah	Lampulo	II Indra Budiman Dusun I Tpk Di Sayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
136	Nurmayyati	Lampulo	II Indrabudiman Dun Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
137	Nurselly	Lampulo	II Sim Raja Jurong T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
138	Nurrahah	Lampulo	II Kenari I Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
139	Nurrah Zahara	Lampulo	II Indra Budiman No 3 Dusun Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
140	Nurzahari	Lampulo	II Indra Budiman No 1 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
141	Putriani	Lampulo	II Lasser Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
142	Rahmadalema	Lampulo	II Seroja No 13 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
143	Rahmadani	Lampulo	II T Dblang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
144	Rahmawati Rusmadi	Lampulo	II Sim Raja Lr Keuchik Al Jurong T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
145	Rahmawati	Lampulo	II Lasser Dusun Tpk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
146	Ramlihan Adam	Lampulo	II Dahlia Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
147	Rasyidah	Lampulo	II Sim Raja Lr Teratai Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
148	Resania	Lampulo	II Beringin II Dusun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
149	Retsyia Maulidya Putri	Lampulo	II Kamboja Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
150	Rena Fathma	Lampulo	II Seroja Jurong Malahayati Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
151	Rika Mubasari	Lampulo	II Indra Budiman Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
152	Rina Surtati	Lampulo	II Petai Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
153	Rochaniyah	Lampulo	II Alarsia 84 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
154	Rohana Amajid	Lampulo	II Kenari Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
155	Rosdiana	Lampulo	II Kenari I No 10 Dusun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
156	Roslani	Lampulo	II Jempua I Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
157	Rosnati	Lampulo	II Teratai No 11 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
158	Rosni	Lampulo	II Seroja No 9 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
159	Rubiah	Lampulo	II Kamboja Dun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
160	Saidah	Lampulo	II Kenari Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
161	Sahbah	Lampulo	II Indra Budiman Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
162	Salma	Lampulo	II Kamboja Dusun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
163	Salma M Ali	Lampulo	II Kenari Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
164	Salmawati	Lampulo	II Kamboja Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
165	Salni	Lampulo	II Sim Raja Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh

166	Salsiah	Lampulo	II Singamharaja No. 216 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
167	Samsariah	Lampulo	II Kenari Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
168	Sapiah	Lampulo	II Kemboja Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
169	Sarida	Lampulo	II Kenari Dsn T 1 Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
170	Sarwiyanti	Lampulo	II Louser Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
171	Seri Maryati	Lampulo	II Indra Budiman Dsn Tgk Disayang Gp Lampulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
172	Siska Riina	Lampulo	II Tanjung Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
173	Siti Fatimah	Lampulo	II Indra Budiman Dsn Tgk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
174	Siti Imran	Lampulo	II Sm Raja Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
175	Sri Maryati	Lampulo	II Indra Budiman Dusun Tgk. Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
176	Sri Wahyuni	Lampulo	II Teratai Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
177	Sumanah	Lampulo	II Bush Delima Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
178	Sopiyandi	Lampulo	II. Setoja 2 Dsn. Malahayati Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
179	Surti Hadiatul Huda	Lampulo	II Kamboja Jurong J.E.Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
180	Sy. Alma Faziah	Lampulo	II. Melur No 12 Dsn Teuhoh Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
181	Syahrial	Lampulo	II. Bush Delima Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
182	Syahriol Rasi. Ar	Lampulo	II. Indra Budiman Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
183	Syamiah	Lampulo	II. Kenari I Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
184	Syarbani	Lampulo	II. Kenari II Dusun T. T. Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
185	Syarifah Nurhidah	Lampulo	II. Kenari No. 01 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
186	Syakima	Lampulo	II S M Raja Dsn T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
187	Ti Aminah	Lampulo	II. B Delima Dsn Tgk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
188	Tharauli Rangkiti	Lampulo	II. Kamboja Dusun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
189	Tuty Rahayu	Lampulo	II. T Teuhoh Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
190	Wardah	Lampulo	II. Kenari Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
191	Widia	Lampulo	II Dahlia Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
192	Widita S	Lampulo	II. Louser Dsn Tgk Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
193	Wirda	Lampulo	II Dahlia Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
194	Yati Ramadhani	Lampulo	II. Angrek II No.3 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
195	Yetti Khairani	Lampulo	II Indra Budiman Dsn T Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
196	Yuliana Abdillah	Lampulo	II Berangan II Dsn T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
197	Yusita Sari	Lampulo	II. Kenari No 03 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
198	Yusriani Sulaiman	Lampulo	II. Indra Budiman Dsn Tgk. Disayang Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
199	Yusniawati	Lampulo	II. Kamboja Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
200	Yusrawati	Lampulo	II. Tanjung Dusun T T Dipulo Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
201	Zahara	Lampulo	II. Kemboja Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
202	Zahrina	Lampulo	II. Sm Raja Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
203	Zainab	Lampulo	II. sm Raja Dsn Malahayati Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
204	Zuhra	Lampulo	II Tutu No 16 Lampulo Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh



Gambar 9

Nama Penerima PKH dan BPNT



LIST UMKM GAMPONG LAMPULO

NO	NAMA USAHA	BERIKUTNYA TERDIRI	NAMA PERUSAHA	ALAMAT USAHA	HP	EMAIL/ALAMAT USAHA	NO PERUSAHA
1	UD TUNA	PERUSAHAAN RUMAH	MALEH	DESA PASIR BIRAH	0971193118		0971193684
2	NOBRI	PERUSAHAAN RUMAH	SOAMBADE	DESA MAMAKANTI	0971193743		0981000348
3	UD BAKUL	PERUSAHAAN RUMAH	DESA PASIR BIRAH				0971193799
4	PERUSAHAAN	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			0981000379
5	KELOMPOK TERBUKA	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			0981000383
6	DETI MUDA	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			0971193741
7	UDONG	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
8	DEKAMAH	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
9	KELOMPOK KUBU BUKAN	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
10	KELOMPOK KUBU BUKAN	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
11	JALAN MUDA TERBUKA	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
12	JALAN MUDA TERBUKA	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
13	JALAN MUDA TERBUKA	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
14	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
15	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
16	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
17	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
18	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
19	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
20	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
21	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
22	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
23	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
24	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
25	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
26	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
27	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
28	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
29	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
30	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
31	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
32	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			
33	MADON	PERUSAHAAN RUMAH	DESA MAMAKANTI	DESA PASIR BIRAH			

Gambar 10

Nama pelaku UMKM Lampulo